

**UPAYA DETERENS AMERIKA SERIKAT TERHADAP EKSPANSI
TIONGKOK MELALUI FOREIGN MILITARY SALES KE TAIWAN**

2021-2024

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Muhammad Fadhil Riski Satria

22323233

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**UPAYA DETERENS AMERIKA SERIKAT TERHADAP EKSPANSI
TIONGKOK MELALUI FOREIGN MILITARY SALES KE TAIWAN**

2021-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Muhammad Fadhil Riski Satria

22323233

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Deterens Amerika Serikat terhadap Ekspansi Tiongkok Melalui Foreign Military Sales ke Taiwan 2021-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

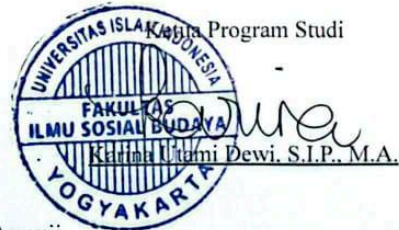
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



23 Februari 2023

Mengesahkan

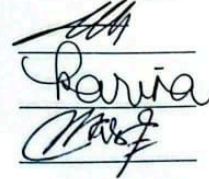
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


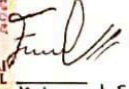
Nama : Muhammad Fadhil Riski Satria
Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan, 26 Agustus 2004
Alamat : Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta
NIM : 22323233
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Februari 2026



Muhammad Fadhil Riski Satria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Cakupan penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB 2	
FOREIGN MILITARY SALES SEBAGAI INSTRUMEN DETERENS AMERIKA SERIKAT TERHADAP TIONGKOK DI ERA PRESIDEN JOE BIDEN.....	17
2.1 Militer Tiongkok sebagai Ancaman Bagi Amerika Serikat.....	17
2.2 Kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan di Era Presiden Biden.....	20
2.3 Foreign Military Sales sebagai Instrumen Deterens terhadap Tiongkok..	24
2.4 Respons Tiongkok terhadap Penjualan Senjata Amerika Serikat.....	31
BAB 3	
FOREIGN MILITARY SALES SEBAGAI INSTRUMEN DETERENS AMERIKA SERIKAT TERHADAP TIONGKOK.....	33
3.1 Foreign Military Sales dalam Kerangka Komitmen Strategis Amerika Serikat terhadap Taiwan.....	33
3.2 Kapabilitas Amerika Serikat sebagai Fondasi Deterens terhadap Tiongkok.	38
3.3 Kredibilitas Deterens Amerika Serikat di Mata Tiongkok.....	42
BAB 4	
PENUTUP.....	49

4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Rekomendasi.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Paket FMS pada Masa Biden (2021-2024)..... 25

DAFTAR SINGKATAN

TRA	: Taiwan Relations Act
FMS	: Foreign Military Sales
DCS	: Direct Commercial Sales
AECA	: Arms Export Control Act
FAA	: Foreign Assistance Act
DSCA	: Defense Security Cooperation Agency
PLA	: People's Liberation Army
PLAAF	: People's Liberation Army Air Force
PLAAN	: People's Liberation Army Navy
CCG	: China Coast Guard
LIO	: Liberal International Order
KMT	: Kuomintang
DPP	: Democratic Progressive Party
FPGA	: Field-Programmable Gate Arrays
ADIZ	: Air Defense Identification Zone
NSS	: National Security Strategy
TSMC	: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
UMC	: United Microelectronics Company
USTBC	: US-Taiwan Business Council
TSM	: Taiwan Security Monitor

ABSTRAK

Selat Taiwan merupakan salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia akibat meningkatnya ketegangan antara Tiongkok, Taiwan, dan Amerika Serikat. Kebangkitan Tiongkok di bawah Xi Jinping yang menegaskan Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya mendorong peningkatan tekanan militer dan politik yang semakin intensif. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden merespons dinamika ini melalui program Foreign Military Sales sebagai instrumen deterens untuk menjaga status quo dan menahan ekspansi Tiongkok. Menggunakan kerangka deterens Steven L. Spiegel yang menekankan komitmen, kapabilitas, dan kredibilitas, penelitian ini menyimpulkan bahwa FMS era Biden memenuhi ketiga unsur tersebut, namun efektivitasnya bersifat parsial karena berhasil mencegah konfrontasi militer langsung tetapi belum mampu menghentikan operasi zona abu-abu Tiongkok secara menyeluruh.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Deterens, Keamanan, Pertahanan, Stabilitas, Taiwan, Tiongkok

ABSTRACT

The Taiwan Strait is one of the most conflict-prone regions in the world amid escalating tensions between China, Taiwan, and the United States. China's rise under Xi Jinping, which asserts Taiwan as part of its sovereignty, has driven increasingly intense military and political pressure. The Biden administration responded through the Foreign Military Sales program as an instrument of deterrence to maintain the status quo and constrain China's expansion. Using Steven L. Spiegel's deterrence framework emphasizing commitment, capability, and credibility, this study concludes that Biden-era FMS fulfills all three elements, though its effectiveness is partial as it successfully prevented direct military confrontation but fell short of halting China's gray zone operations entirely.

Key Words: Deterrence, Security, Defense, Stability, Taiwan, United States, China

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan hegemon di kawasan Asia Pasifik, yang mana posisi tersebut tercermin dari dominasi jaringan aliansi keamanan dan arsitektur ekonomi yang dibangunnya selama lebih dari setengah abad. Melalui kemitraan perdagangan dan perjanjian keamanan yang luas, Amerika Serikat membentuk tatanan regional yang relatif stabil, yang mana tatanan tersebut menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor sentral dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Strategi tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan tatanan internasional liberal (*liberal international order/LIO*) yang dikembangkan sejak awal Perang Dingin, yang mana proyek tersebut bertumpu pada pembukaan pasar, penguatan institusi multilateral, serta pembentukan komunitas keamanan yang didukung oleh jaringan aliansi di Eropa dan Asia. Struktur inilah yang kemudian menjadi dasar bagi keberlangsungan kepemimpinan strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik selama beberapa dekade (Ikenberry 2014, 42-45).

Namun, tatanan yang dibangun tersebut mulai menghadapi tantangan ketika Tiongkok mengalami kebangkitan secara ekonomi dan militer yang signifikan. Kebangkitan Tiongkok menciptakan perubahan dalam distribusi kekuatan kawasan, yang mana kondisi ini secara bertahap mengurangi dominasi Amerika Serikat dan memunculkan persepsi ancaman terhadap posisi hegemoninya (Khan, Anwar, and Hammaduddin 2021, 641). Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok mengalami perkembangan ekonomi dan militer yang

sangat pesat, yang mana pertumbuhan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas domestiknya, tetapi juga memperluas peran dan pengaruhnya dalam sistem internasional. Secara ekonomi, Tiongkok menjadi salah satu pusat perdagangan dan investasi global serta mendorong proyek infrastruktur lintas kawasan seperti Belt and Road Initiative, yang mana langkah tersebut memperkuat jejaring pengaruhnya di berbagai wilayah dunia. Di sisi lain, di sektor pertahanan, modernisasi militernya yang disertai dengan peningkatan anggaran pertahanan dan pengembangan teknologi militer yang canggih menunjukkan adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatannya di kawasan Asia-Pasifik (Budiana 2023, 66).

Arah strategis kebangkitan Tiongkok semakin terlihat ketika Xi Jinping memperkenalkan gagasan Chinese Dream, yang mana konsep tersebut menekankan kebangkitan kembali kejayaan nasional dan penempatan Tiongkok sebagai kekuatan besar yang dihormati di tingkat global. Dalam berbagai pernyataannya, Xi menegaskan bahwa posisi Tiongkok di antara negara-negara besar dunia serta kemampuannya berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan internasional merupakan bagian penting dari proses kebangkitan nasionalnya. Di dalam gagasan tersebut, kedaulatan atas seluruh wilayah yang diklaim menjadi bagian dari integritas teritorial Tiongkok dipandang krusial, dan kebangkitan nasional belum dianggap lengkap jika masih ada wilayah yang belum berada di bawah kontrol Beijing. Taiwan menjadi isu paling sensitif karena dianggap bagian tak terpisahkan dari kedaulatan Tiongkok sekaligus simbol sejarah kelam yang ingin diakhiri melalui kebangkitan nasional tersebut (Chávez Mazuelos 2022, 39-41).

Kebangkitan Tiongkok dan penegasan Taiwan sebagai kepentingan internasional langsung menantang struktur keamanan kawasan yang selama ini berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, menggeser hubungan kedua negara dari kompetisi biasa menuju rivalitas kekuatan besar (Tan and Tan 2025, 182). Taiwan menjadi titik utama di mana kepentingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok saling beririsan, karena setiap perkembangan terkait status dan keamanan pulau tersebut memicu respons timbal balik dari kedua pihak. Sejak normalisasi hubungan diplomatik 1979, Amerika Serikat memang mengakui One China Policy, namun di saat yang sama Kongres juga mengesahkan Taiwan Relations Act (TRA), yang memungkinkan Washington mempertahankan hubungan non-formal dan membantu Taiwan menghadapi ancaman atau tekanan atau upaya koersif lainnya yang dapat mengganggu keamanan, sosial, maupun ekonomi masyarakatnya (Sudarno 2025, 441). Kondisi ini, menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, Amerika Serikat harus menjaga kredibilitasnya di mata sekutunya di Asia Timur serta memastikan stabilitas Selat Taiwan, sementara di sisi lain harus menghindari eskalasi langsung dengan Beijing yang bisa memicu konflik militer (Pratiwi, Saraswati, and Muttaqien 2018, 353).

Dalam menghadapi kondisi yang kompleks tersebut, pendekatan yang ditempuh oleh Amerika Serikat adalah memastikan agar tidak ada perubahan status quo secara sepihak. Pendekatan semacam ini dipahami sebagai deterens, yang mana deterens merujuk pada upaya untuk mencegah, menghalangi, atau menangkal suatu aktor melakukan tindakan yang tidak diinginkan dengan meningkatkan persepsi biaya atau menurunkan peluang keberhasilan tindakan

tersebut (Mazarr 2018). Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dikarenakan kondisi yang sensitif di Selat Taiwan, Amerika Serikat menerapkan deterens ganda terhadap Tiongkok dan Taiwan.

Deterens ganda ini dapat dipahami melalui kebijakan yang dikenal sebagai *strategic ambiguity*, di mana Amerika Serikat secara sengaja tidak memberikan kepastian jelas apakah akan melakukan intervensi militer apabila Taiwan diserang. Ketidakjelasan tersebut bukan merupakan inkonsistensi kebijakan, melainkan instrumen penangkal yang dirancang untuk menciptakan ketidakpastian strategis bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, kebijakan ini menahan Tiongkok dari mengambil langkah militer karena adanya kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat. Di sisi lain, kebijakan ini juga membatasi langkah Taiwan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak, karena tidak terdapat jaminan otomatis perlindungan dari Washington. Melalui pengelolaan ketidakpastian tersebut, Amerika Serikat berupaya mempertahankan status quo serta mengurangi kemungkinan eskalasi konflik di Selat Taiwan, yang tentunya tidak akan menguntungkan bagi Amerika Serikat dan sekutunya (Grzegorzewski 2022, 60-61).

Karena, apabila terjadi perubahan status quo secara sepihak, baik dari Tiongkok maupun Taiwan, hal tersebut berisiko mengganggu aktivitas ekonomi global karena Selat Taiwan merupakan jalur pelayaran yang sangat sibuk, dilalui 88% kapal kontainer terbesar dunia dan setengah armada global. Taiwan juga menjadi basis armada besar yang terhubung dengan logistik internasional. Gangguan, seperti konflik atau blokade, akan memaksa kapal menempuh rute lebih panjang, menurunkan efisiensi angkut, dan mengganggu rantai pasok global

(Bellocchi 2023, 67-69). Selain Selat Taiwan menjadi jalur pelayaran vital bagi perdagangan global, Taiwan sendiri juga menempati posisi strategis dalam industri teknologi canggih, terutama dalam hal semikonduktor. Pulau ini menjadi pusat produksi chip yang menopang industri global, dengan perusahaan seperti TSMC dan UMC menguasai sekitar 50% pangsa pasar dunia dan mampu memproduksi chip canggih yang hanya disaingi sedikit perusahaan internasional. Posisi ini diperkuat oleh keterhubungannya dengan perusahaan teknologi multinasional, ekosistem industri yang matang, kebijakan negara yang mendukung, tenaga kerja terampil, dan biaya produksi yang efisien. Kombinasi jalur perdagangan vital dan keunggulan industri teknologi ini menjadikan stabilitas Taiwan sangat penting bagi kelancaran ekonomi global dan kepentingan strategis Amerika Serikat (Hanif, Haider, and Afzal 2025, 71; Putri et al. 2024, 75; Muhammad-Lawal et al. 2025, 105).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin cenderung menunjukkan tindakan koersifnya kepada Taiwan untuk mempercepat proses reunifikasi sesuai dengan agenda kebangkitan nasionalnya. Hal ini terutama terjadi setelah dilantiknya Presiden Tsai Ing-wen sebagai Presiden Taiwan ke-7 pada tahun 2016, yang mana dalam beberapa kesempatan ia menyatakan menolak Konsensus 1992 yang selama ini dijadikan dasar interpretasi *One China* oleh Beijing. Penolakan tersebut dipandang Beijing sebagai penyimpangan dari kerangka *One China* yang menempatkan Taiwan sebagai bagian dari entitas Tiongkok secara keseluruhan, terlepas dari perbedaan sistem politik di kedua sisi, sehingga hal tersebut mendorong respons yang tegas dari Beijing. Respons ini dapat dilihat melalui tekanan militer yang mengalami peningkatan signifikan pada

tahun 2016, yang mana aktivitas People's Liberation Army (PLA) di sekitar Selat Taiwan semakin intens, yang mana patroli udara dan laut dilakukan secara lebih rutin, dan dalam beberapa kesempatan bahkan pesawat atau kapal Tiongkok berani melintasi garis median yang sebelumnya relatif diakui sebagai perbatasan tidak resmi antara kedua negara. Bahkan kapal induk Tiongkok beberapa kali melintasi Selat Taiwan. Operasi militer di sekitar pulau pun semakin dinormalisasikan. Pola ini menunjukkan bahwa Beijing berupaya memperlihatkan kapasitas militernya sekaligus menegaskan klaim kedaulatan atas Taiwan, yang mana langkah tersebut juga diarahkan untuk menghalangi potensi intervensi eksternal, khususnya dari Amerika Serikat (Xiao 2024, 134).

Peningkatan tekanan tersebut kemudian memicu respons dari Amerika Serikat, yang mana Washington tidak tinggal diam saja. Sesuai dengan amanat TRA, Amerika Serikat memandang tindakan-tindakan koersif tersebut sebagai bentuk intimidasi yang berpotensi mengubah status quo di Selat Taiwan. Salah satu instrumen utama yang digunakan Amerika Serikat untuk menanggapi agresivitas tersebut adalah dengan meningkatkan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada saat itu, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menyetujui sejumlah paket penjualan bernilai besar, dengan total sekitar \$18 miliar. Paket penjualan tersebut disalurkan melalui program Foreign Military Sales (FMS), yang mana diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan sekaligus menegaskan komitmen politik Washington di tengah meningkatnya tekanan dari Tiongkok. Penjualan senjata tersebut berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan kekuatan militer

Tiongkok dan membentuk kalkulasi biaya apabila opsi militer ditempuh (Xiying 2019, 14).

Meskipun peningkatan penjualan senjata pada masa pemerintahan Donald Trump memperkuat dukungan terhadap Taiwan, namun pendekatan tersebut dinilai masih belum sepenuhnya memadai dalam membangun deterens yang benar-benar menangkal agresivitas Tiongkok, dikarenakan kebijakan luar negeri Trump yang berlandaskan pada pendekatan *America First*. Sehingga, isu Taiwan cenderung dilihatnya dalam kerangka yang lebih lebih transaksional. Sebaliknya, pada masa Joe Biden, yang mana menjadi fokus penelitian ini, kebijakan terhadap Taiwan lebih menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam mengelola *strategic ambiguity* dan deterens. Di masa Presiden Biden, penjualan senjata melalui FMS tetap dilanjutkan, namun diarahkan ke dalam kerangka yang yang lebih terstruktur untuk memperkuat pertahanan Taiwan sekaligus menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap stabilitas kawasan dan pembatasan ekspansionisme Tiongkok (Larasati and Larasati 2025, 169-170).

Kasus Taiwan ini menjadi unik karena, berbeda dengan negara lain di mana penjualan senjata biasanya harus mengikuti standar atau ketentuan tertentu atau selaras dengan kepentingan Amerika Serikat atau tidak, namun dalam kasus ini, kebijakan penjualan senjata ini sudah diatur secara khusus oleh TRA yang menegaskan kewajiban Amerika Serikat untuk menyediakan sarana pertahanan yang memadai bagi Taiwan, sehingga penjualan senjata melalui FMS di sini bukan hanya sekedar jual beli senjata saja tetapi, berperan langsung sebagai instrumen deterens strategis. Hal ini menegaskan urgensi penelitian ini, karena pergeseran strategi dari pendekatan transaksional era Trump ke pendekatan

terstruktur era Biden memberikan peluang untuk menganalisis secara efektivitas FMS sebagai alat utama deterens Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada masa Biden serta bagaimana penjualan senjata yang lebih sistematis ini berpotensi mempengaruhi kalkulasi Beijing dalam mempertimbangkan langkah-langkah koersifnya terhadap Taiwan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Amerika Serikat menggunakan program *Foreign Military Sales* ke Taiwan pada tahun 2021-2024 sebagai deterens terhadap Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji secara komprehensif kebijakan FMS Amerika Serikat kepada Taiwan selama periode 2021-2024, termasuk jenis-jenis alutsista yang dijual, nilai transaksi, serta latar belakang politik, hukum, dan keamanan yang mendasari kebijakan tersebut dalam konteks hubungan bilateral Amerika Serikat-Taiwan.
2. Menganalisis bagaimana kebijakan FMS digunakan sebagai deterens oleh Amerika Serikat terhadap ekspansi Tiongkok, dengan menelaah cara FMS berkontribusi pada peningkatan kapabilitas pertahanan Taiwan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kalkulasi strategis Beijing dalam isu reunifikasi.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini secara spesifik mengkaji kebijakan FMS Amerika Serikat kepada Taiwan selama periode 2021 hingga 2024 di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Periode ini dipilih karena mencerminkan satu masa jabatan penuh yang memungkinkan analisis pola dan orientasi kebijakan secara komprehensif. Batas akhir 2024 ditentukan karena pergantian pemerintahan kepada Donald Trump pada Januari 2025 membawa pendekatan kebijakan yang berbeda, sehingga pemisahan periode ini penting untuk menjaga konsistensi analisis. Fokus utama penelitian terletak pada bagaimana FMS digunakan sebagai instrumen deterens terhadap agresi militer Tiongkok, mencakup komposisi paket penjualan, respons Tiongkok, serta implikasinya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Salah satu literatur yang relevan dalam memahami dinamika kebijakan deterens Amerika Serikat terhadap Tiongkok melalui mekanisme FMS adalah jurnal artikel karya Wei-Chin Lee yang berjudul "*US Arms Transfer Policy to Taiwan: From Carter to Clinton*" (2010), yang mengulas secara komprehensif kebijakan penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan antara akhir 1970-an hingga 1990-an. Artikel ini, memang telah memaparkan secara runtut kebijakan penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan dari era Carter hingga Clinton, namun terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Fokus temporalnya yang terbatas pada periode 1970-1990-an membuat argumen-argumen yang diajukan terasa kurang relevan dalam menghadapi realitas geopolitik kontemporer, khususnya pasca-2020. Selain itu, artikel ini tidak secara mendalam

mengevaluasi efektivitas jangka panjang FMS sebagai alat deterens terhadap ekspansi militer Tiongkok. Penjualan senjata digambarkan lebih sebagai simbol politik dalam kerangka *strategic ambiguity* daripada sebagai strategi militer yang proaktif. Bahkan, keputusan penjualan senjata Amerika Serikat disebut terlalu berhati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan di Selat Taiwan, dengan senjata yang hanya memberikan efek deterens terbatas, dan sering kali tidak relevan dengan kebutuhan pertahanan Taiwan, serta menciptakan ketergantungan politik terhadap keputusan Washington (Lee 2010, 73-76).

Jurnal artikel karya Aaron Aitken yang berjudul "*The Future of U.S.-Taiwan Arms Sales*" (2013), menawarkan pandangan menarik tentang kebijakan penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan. Dalam artikel ini, Aitken menganalisis tiga pendekatan kebijakan penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Pertama, terdapat opsi untuk menghentikan penjualan senjata sama sekali. Kedua, meningkatkan penjualan senjata bertujuan memperkuat kapasitas militer Taiwan. Ketiga, mengambil pendekatan yang lebih moderat dengan mempertahankan ambiguitas strategis. Aitken dalam artikelnya berargumen bahwa pendekatan ketiga adalah solusi paling pragmatis untuk menghindari konflik terbuka dengan Tiongkok (Aitken 2013, 7-11). Di satu sisi, kebijakan ini memang berhasil menjaga ketegangan yang relatif stabil, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ambiguitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memperkuat posisinya, serta menciptakan rasa optimisme yang berlebihan di pihak Taiwan. Selain itu, sama halnya dengan artikel Lee, artikel ini memiliki keterbatasan temporal yang hanya mencakup dinamika kebijakan hingga awal 2010-an, sehingga kurang menjawab tantangan kontemporer pasca-2020. Dari

kedua literatur tersebut, terlihat bahwa pembahasan tentang FMS ke Taiwan masih banyak berfokus pada konteks masa lalu dan belum menyentuh tantangan baru yang muncul setelah 2020. Baik tulisan Lee (2010) maupun Aitken (2013) memberikan dasar yang penting untuk memahami logika di balik kebijakan FMS, tetapi keduanya belum menjawab bagaimana kebijakan ini bekerja dalam konteks meningkatnya tekanan militer Tiongkok dan perubahan strategi keamanan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur pasca-2020.

Menanggapi celah yang ditinggalkan oleh literatur-literatur sebelumnya, sebuah studi yang lebih terkini, yaitu jurnal artikel "*Analyzing Biden's Approach to Taiwan: Patterns of Continuity and Change*" oleh Sumeera Imran dan Humayun Javed (2024), mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kebijakan FMS dalam konteks strategi deterens Tiongkok yang lebih relevan. Dalam artikel tersebut, Imran dan Javed menyoroti pergeseran kebijakan Amerika Serikat di era Biden dari *strategic ambiguity* menuju *strategic clarity*, dengan menekankan pentingnya Taiwan bagi stabilitas kawasan. Mereka mencatat langkah-langkah seperti peningkatan bantuan militer dan pengesahan UU TPA 2022 sebagai bentuk dukungan konkret (Imran and Javed 2024, 98-99). Namun demikian, seperti literatur-literatur sebelumnya, masih terdapat kekurangan dari artikel ini. Salah satu kekurangan dari artikel ini cenderung fokusnya pada hanya dimensi retorika dan legislasi saja, tanpa mengkaji secara mendalam dampak nyata kebijakan tersebut dalam mencegah konflik. Selain itu, pembahasan mengenai FMS memang ada dalam artikel tersebut, namun cenderung hanya dijelaskan sebagai bagian dari kelanjutan kebijakan luar negeri AS yang sudah ada sebelumnya, bukan sebagai strategi aktif dalam merespons dinamika militer

Tiongkok. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini berupaya menelaah lebih lanjut peran FMS sebagai instrumen deterrens melalui studi kasus Taiwan, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat era 2021-2024.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori *Deterrence* yang dikemukakan oleh Steven L. Spiegel dalam bukunya “*World Politics in a New Era*” (1995) sebagai landasan untuk menganalisis kebijakan FMS Amerika Serikat terhadap Taiwan dari 2021 sampai 2024. Menurut Spiegel, *deterrence* merupakan strategi yang bertujuan mencegah terjadinya perang dengan cara membuat pihak lawan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan agresif. Strategi ini tidak semata-mata tentang kekuatan militer, tetapi lebih pada kemampuan mengatur persepsi. Negara yang ingin mencegah serangan harus mampu meyakinkan pihak lawan bahwa setiap tindakan ofensif akan menimbulkan konsekuensi serius. Dengan kata lain, *deterrence* adalah komunikasi strategis yang berbicara melalui tindakan dan kesiapan untuk merespons (Spiegel 1995, 507).

Agar strategi ini berhasil, Spiegel menyebutkan terdapat tiga unsur penting yaitu komitmen, kapabilitas, dan kredibilitas (Spiegel 1995, 510). Unsur pertama adalah komitmen. Komitmen merujuk pada sikap tegas dan terbuka dari suatu negara untuk menetapkan batas-batas perilaku yang dianggap tidak dapat diterima. Negara penangkal harus menyampaikan dengan jelas bahwa tindakan tertentu akan menimbulkan respons yang serius, serta bahwa ia tidak akan ragu untuk bertindak jika garis tersebut dilanggar. Komitmen yang dimaksud bukan sekadar retorika, melainkan suatu kesediaan untuk menanggung biaya politik,

diplomatik, maupun militer dalam rangka mempertahankan batas tersebut. Tanpa komitmen yang eksplisit dan konsisten, sinyal yang dikirimkan kepada pihak lawan akan bersifat ambigu, sehingga sulit menghasilkan efek pencegahan yang diinginkan (Spiegel 1995, 511-512).

Unsur kedua adalah kapabilitas. Ini menyangkut sejauh mana negara penangkal memiliki kekuatan yang nyata dan dapat diandalkan untuk melaksanakan ancaman yang telah disampaikan. Kapabilitas mencakup tidak hanya jumlah dan jenis kekuatan militer, tetapi juga kesiapan operasional, kecanggihan teknologi, serta sistem pendukung logistik dan komunikasi. Lebih jauh lagi, kapabilitas juga mencakup kapasitas ekonomi dan politik untuk menopang tindakan jangka panjang, termasuk jika konflik eskalatif terjadi. Ancaman yang berasal dari negara tanpa kapabilitas yang kredibel akan kehilangan daya pengaruhnya, karena tidak menciptakan rasa gentar pada pihak yang dihadapi (Spiegel 1995, 512-513).

Unsur ketiga adalah kredibilitas. Kredibilitas adalah faktor penentu apakah ancaman akan dipercaya oleh pihak lawan. Ini berkaitan dengan persepsi bahwa negara penangkal benar-benar bersedia dan mampu melakukan tindakan yang telah dinyatakan jika diperlukan. Kredibilitas dibentuk dari berbagai aspek, seperti rekam jejak kebijakan sebelumnya, konsistensi dalam pernyataan dan tindakan, serta kejelasan dalam menyampaikan sinyal strategis. Kredibilitas juga diperkuat ketika negara penangkal menunjukkan kesediaan untuk mengambil risiko dalam mempertahankan komitmennya, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tanpa kredibilitas, dua unsur lainnya tidak akan berfungsi secara

optimal, karena pihak lawan tidak memiliki alasan yang cukup untuk menganggap ancaman tersebut serius (Spiegel 1995, 513-514).

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian ini memandang FMS sebagai lebih dari sekadar bantuan militer teknis. FMS juga berfungsi sebagai sinyal strategis yang mencerminkan komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Taiwan dan kestabilan kawasan. Kebijakan ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada Tiongkok bahwa setiap tindakan agresif akan membawa konsekuensi serius. Dengan demikian, FMS menjadi bagian dari strategi *deterrence* Amerika Serikat yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan regional dan menahan setiap upaya perubahan status quo secara sepihak.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan dari data-data yang sudah dikumpulkan argumen sementara penelitian ini berargumen bahwa Foreign Military Sales Amerika Serikat ke Taiwan pada 2021-2024 berfungsi sebagai instrumen deterens terhadap Tiongkok yang memenuhi ketiga unsur deterens efektif dalam kerangka Steven L. Spiegel. Pertama, FMS mewujudkan komitmen Amerika Serikat secara konkret melalui landasan hukum yang berlapis, konsistensi penjualan yang responsif terhadap provokasi Tiongkok, serta pernyataan pejabat yang terkoordinasi. Kedua, FMS memperkuat kapabilitas deterens Amerika Serikat melalui penguatan asimetris Taiwan yang mempersulit kalkulasi invasi Tiongkok. Ketiga, pilihan Tiongkok untuk menghindari konfrontasi langsung dan beralih ke operasi zona abu-abu mencerminkan bahwa deterens Amerika Serikat diperhitungkan Beijing,

meskipun belum sepenuhnya mampu menghentikan tekanan Tiongkok secara menyeluruh.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan pandangan yang dimiliki individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial, dengan menekankan eksplorasi terhadap konteks serta pengalaman subjektif dari para aktor yang terlibat (Creswell 2018, 81). Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat menelaah secara komprehensif bagaimana kebijakan FMS Amerika Serikat ke Taiwan digunakan sebagai instrumen deterens terhadap ekspansi militer Tiongkok.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Amerika Serikat, sementara itu, objek penelitian ini adalah kebijakan FMS Amerika Serikat ke Taiwan pada periode 2021-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data dikaji secara sistematis untuk dianalisis, diolah, dan disimpulkan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian (Sari and Khaidir 2020, 44).

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian dimulai dengan menentukan pertanyaan, kemudian memilih sumber sekunder yang sesuai. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada dan menghubungkannya dengan teori yang relevan (Wickham 2019, 396).

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab sebagai berikut:

Bab 1 akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 akan membahas ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan sebagai konteks yang melatarbelakangi kebijakan deterens Amerika Serikat, kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan di era Presiden Biden beserta pergeseran orientasinya, FMS sebagai instrumen deterens terhadap Tiongkok termasuk data paket penjualan 2021-2024 dan perbandingannya dengan era Trump, serta respons Tiongkok terhadap penjualan senjata Amerika Serikat.

Bab 3 akan menganalisis FMS sebagai instrumen deterens menggunakan kerangka deterens Steven L. Spiegel melalui tiga unsur utama, yaitu komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan Taiwan, kapabilitas Amerika Serikat sebagai fondasi deterens di kawasan, serta kredibilitas deterens Amerika Serikat yang dinilai melalui respons dan perilaku militer Tiongkok.

Bab 4 akan memuat kesimpulan dari temuan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

FOREIGN MILITARY SALES SEBAGAI INSTRUMEN DETERENS

AMERIKA SERIKAT TERHADAP TIONGKOK DI ERA PRESIDEN JOE

BIDEN

2.1 Militer Tiongkok sebagai Ancaman Bagi Amerika Serikat

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah mempertahankan stabilitas di Selat Taiwan dengan menjaga status quo, yang mana didukung oleh dominasi kekuatan militer, ekonomi, dan pengaruh politiknya. Keunggulan tersebut memungkinkan Washington mencegah baik Beijing maupun Taipei mengambil langkah sepihak yang berpotensi mengubah keseimbangan dan mendorong mereka untuk menyelesaikan konflik mereka dengan secara damai. Namun, kondisi ini sudah berubah seiring dengan kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar baru di dunia, yang kini menantang posisi Amerika Serikat sebagai hegemoni global, yang mana pertumbuhan ekonomi pesatnya memungkinkan Tiongkok mempersempit kesenjangan dengan Amerika Serikat sekaligus membiayai modernisasi militer yang ambisius hingga menempatkannya sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia (Campagnola 2024, 5-6).

Di bawah Xi Jinping, reformasi militer diarahkan pada strategi *anti-access/area denial* (A2/AD) melalui pendekatan Military-Civil Fusion, yang mana strategi tersebut dirancang untuk mempersulit proyeksi kekuatan Amerika Serikat di kawasan melalui kemampuan serangan rudal balistik dan jelajah, operasi kapal selam, serangan udara jarak jauh, peperangan siber, hingga

kemampuan anti-satelit. Hasilnya, Tiongkok kini mengoperasikan armada laut terbesar di dunia dengan 355 kapal perang, angkatan udara terbesar ketiga di dunia, dan yang paling mengkhawatirkan adalah rudal hipersonik yang mampu menembus sistem pertahanan Amerika Serikat, rudal balistik antarbenua berjangkauan global seperti DF-5 dan DF-41, serta armada kendaraan tempur tak berawak yang mencakup berbagai UCAVs dan teknologi drone kawanan, yang mana keseluruhan kapabilitas tersebut secara langsung memperumit kalkulasi strategis Amerika Serikat dalam mempertahankan deterensnya terhadap Tiongkok di kawasan (Babar and Khan 2022, 52-55).

Persenjataan Tiongkok yang terus berkembang ini memberikan Beijing instrumen koersif yang semakin nyata terhadap Taiwan serta Amerika Serikat. Yang mana hal ini terlihat paling jelas dalam latihan militer berskala besar pada Agustus 2022 sebagai respons atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan, di mana PLA menembakkan sebelas rudal balistik, melancarkan ratusan pengerahan pesawat-pesawat tempurnya ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, dan menempatkan kapal perang yang mengepung pulau tersebut dalam simulasi operasi blokade gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman ini semakin serius dengan berkembangnya kapabilitas nuklir Tiongkok, yang mana dalam laporan Nuclear Posture Review 2022, mencatat bahwa peningkatan arsenal nuklir Tiongkok hingga awal 2030-an akan memberikannya kemampuan koersi nuklir yang lebih luas, didukung oleh rudal DF-26 yang berjangkauan 3,000 hingga 4,000 kilometer yang mampu menyasar Guam, yang merupakan wilayah Amerika Serikat yang mana terdapat pangkalan militer Amerika Serikat disana (Doyle, Kawoosa, and Aluckal 2024), rudal DF-27

berjangkauan minimal 5,000 kilometer, serta pesawat H-6N *bomber* yang berkemampuan nuklir.

Kapabilitas tersebut semakin mengkhawatirkan ketika dipadukan dengan doktrin militer Tiongkok yang termuat dalam *Science of Military Strategy 2020*, yang mana dokumen tersebut secara eksplisit mempersiapkan PLA untuk operasi blokade strategis guna mengisolasi dan melumpuhkan Taiwan, sehingga menunjukkan bahwa ancaman Tiongkok telah dipersiapkan secara sistematis dalam doktrin operasionalnya dan pada akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk memperkuat postur deterensya secara lebih konkret (Montgomery and Yoshihara 2025, 154-157). Lebih dari sekadar ancaman terhadap Taiwan, modernisasi militer Tiongkok juga secara langsung menantang posisi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang terarah memberikannya keunggulan signifikan dibandingkan Amerika Serikat yang harus membagi kekuatannya untuk memenuhi komitmen di berbagai penjuru dunia, sehingga jumlah aset militer yang dapat dikerahkan ke Indo-Pasifik dalam waktu singkat sangat terbatas (Zulkifli, et al. 2024, 67)

Dengan demikian, ancaman militer Tiongkok bukan sekadar ditujukan kepada Taiwan, tetapi juga secara langsung menantang kepentingan dan posisi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Kombinasi antara modernisasi militer yang masif, doktrin operasional yang terbaru, serta pengembangan kapabilitas yang secara spesifik dirancang untuk menangkal keterlibatan militer Amerika Serikat di kawasan inilah yang pada akhirnya menjadikan deterens sebagai respons yang tidak terelakkan bagi Washington dalam menjaga stabilitas kawasan

dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan penjaga keseimbangan di Indo-Pasifik.

2.2 Kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan di Era Presiden Biden

Pada era Presiden Joe Biden, kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan menunjukkan kesinambungan strategis sekaligus penyesuaian taktis dalam konteks kompetisi dengan Tiongkok. Secara formal, pemerintahan Biden tetap mempertahankan prinsip One China Policy dan mempertahankan ambiguitas strategis yang telah lama menjadi fondasi kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Namun demikian, sejak awal 2021, terjadi reorientasi retorik yang cukup signifikan, yang mana Taiwan tidak lagi hanya diposisikan sebagai mitra keamanan, tetapi juga sebagai entitas normatif yang berada di pusat upaya mempertahankan tatanan Indo-Pasifik berbasis aturan. Pergeseran bahasa kebijakan ini semakin menguat ketika aktivitas militer Tiongkok di sekitar zona identifikasi pertahanan udara Taiwan meningkat pada tahun 2022, yang mana Presiden Biden dalam beberapa kesempatan menyatakan kesiapan Amerika Serikat untuk membela Taiwan apabila terjadi serangan. Meskipun Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan resmi, pengulangan pernyataan tersebut dalam berbagai forum menciptakan apa yang dapat dipahami sebagai kejelasan bersyarat, yang mana secara strategis berfungsi untuk mencegah agresi tanpa sepenuhnya meninggalkan fleksibilitas diplomatik (Anwar and Azam 2026, 1416).

Dibandingkan dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump, kebijakan Biden terhadap Taiwan cenderung lebih sistematis dan

didorong oleh narasi demokrasi. Jika pada era Trump berbagai langkah terhadap Tiongkok sering kali bersifat terpisah dan reaktif, maka di era Biden kebijakan tersebut ditempatkan dalam kerangka strategi yang lebih terkoordinasi. Meskipun banyak kebijakan pertama Biden merupakan kelanjutan dari pendekatan Trump, termasuk definisi Tiongkok sebagai pesaing strategis, mempertahankan tarif impor, melanjutkan kerja sama QUAD, serta meningkatkan patroli angkatan laut di Laut Tiongkok Selatan. Namun, langkah-langkah tersebut kini diintegrasikan ke dalam strategi yang lebih luas yang mencakup penguatan daya saing domestik, revitalisasi aliansi regional, pengurangan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, serta penekanan yang lebih substansial pada nilai demokrasi dan hak asasi manusia (Bao 2023, 200). Dalam kerangka ini, Taiwan memperoleh posisi yang semakin sentral baik secara geopolitik maupun ideologis, yang mana identitasnya dibangun sebagai bagian dari komunitas demokrasi dalam kompetisi global antara demokrasi dan otokrasi sebagaimana tercermin dalam dokumen National Security Strategy pemerintahan Biden (Biden 2025).

Secara normatif, pemerintahan Biden tetap menegaskan bahwa One China Policy tidak akan berubah, namun di saat yang sama, menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat penting bagi kawasan dan komunitas internasional. Penegasan ini sekaligus menjadi prasyarat tidak langsung bagi Tiongkok, sekaligus mempertegas garis merah Amerika Serikat. Selain itu, meskipun, hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan secara formal tetap tidak resmi, tetapi implementasinya semakin menyerupai hubungan resmi, yang mana terlihat sejak diundangnya perwakilan *de facto* Taiwan, Hsiao Bi-khim, dalam acara pelantikan Presiden Biden, yang mana hal tersebut

menunjukkan sinyal dukungan yang kuat kepada Taiwan. Selain secara normatif, secara politis, Presiden Biden berulang kali menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk memenuhi kewajibannya yang sudah diamanatkan dalam TRA, sembari menegaskan prinsip umum kebijakan Taiwan tetap tidak berubah. Pada tingkat bilateral negosiasi kerangka Perjanjian Perdagangan dan Investasi kembali dilanjutkan melalui American Institute in Taiwan pada Juni 2021, yang sempat berhenti pada masa Trump, yang mana hal tersebut menunjukkan upaya memperdalam kemitraan ekonomi. Di tingkat multilateral, isu keamanan Taiwan dan pentingnya perdamaian di Selat Taiwan diangkat dalam berbagai forum seperti pertemuan G7, selain itu, pemerintahan Biden juga terus berupaya untuk memasukkan Taiwan ke dalam organisasi internasional seperti PBB dan WHO (Kuehn 2021, 5-6).

Dari sisi militer, Biden juga menekankan peningkatan kemampuan pertahanan Taiwan sebagai sinyal komitmen tegasnya terhadap Tiongkok dan untuk menunjukkan kesiapan Amerika Serikat membela pulau tersebut, yang mana hal ini bertujuan untuk menaikkan biaya bagi Tiongkok jika mencoba penyatuan secara paksa dan secara efektif menunda atau menghindari konflik militer di Selat Taiwan. Pemerintahan Biden berupaya membentuk lingkungan strategis di Selat Taiwan sedemikian rupa sehingga ruang gerak PLA menjadi semakin terbatas, yang pada akhirnya mempersempit opsi penggunaan kekuatan secara sepihak oleh Tiongkok. Di sisi lain, pemerintahan Biden juga menunjukkan langkah yang relatif lebih maju dalam memperjelas komitmen pertahanannya terhadap Taiwan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Biden menyatakan secara terbuka bahwa Amerika Serikat akan membantu Taiwan apabila terjadi serangan

militer dari Tiongkok. Walaupun pejabat Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat tetap berpegang pada One China Policy, namun pernyataan dari Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan serta Koordinator Indo-Pasifik Kurt Campbell menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Biden bukan hanya sekedar retorika saja (Bao 2023, 205).

Langkah-langkah yang relatif ambigu ini menunjukkan bahwa strategi *strategic ambiguity* tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Joe Biden, namun dalam praktiknya lebih diarahkan kepada Tiongkok, bukan lagi kepada Taiwan, dikarenakan meningkatnya nilai strategis Taiwan bagi kepentingan Amerika Serikat. Taiwan merupakan salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat sekaligus eksportir semikonduktor terbesar di dunia, yang mana menempatkannya pada posisi kunci dalam rantai pasok teknologi global. Dalam konteks kompetisi strategis dengan Tiongkok, posisi ini memberikan daya ungkit yang signifikan bagi Amerika Serikat. Stabilitas dan keberlangsungan Taiwan menjadi aset strategis yang dapat dimanfaatkan Washington untuk menjaga keunggulan teknologi, mengamankan kepentingan ekonominya, serta membatasi akses dan ekspansi pengaruh Tiongkok di sektor teknologi tinggi (Lestari and Yusran 2023, 119).

Dengan demikian, Beijing didorong untuk mempertimbangkan kembali biaya dan risiko apabila tetap menempuh unifikasi secara paksa. Selain melalui sinyal komitmen tersebut, pemerintahan Biden juga berupaya meningkatkan biaya strategis bagi Tiongkok dengan memperkuat kemampuan asimetris Taiwan. Mengingat keunggulan konvensional Tiongkok secara kuantitatif, Oleh karena itu, pemerintahan Biden lebih banyak menyetujui penjualan paket FMS yang bersifat

asimetris yang mana dianggap lebih efektif dalam menciptakan efek deterens terhadap kekuatan yang lebih superior secara kuantitatif. Pengalaman konflik di Ukraina turut dijadikan rujukan oleh sejumlah pejabat pertahanan dan diplomat Amerika Serikat untuk menegaskan pentingnya kesiapan, daya tahan, serta sistem persenjataan yang berorientasi pada pertahanan asimetris bagi Taiwan (Wong and Qin 2022).

2.3 Foreign Military Sales sebagai Instrumen Deterens terhadap Tiongkok

Foreign Military Sales atau FMS merupakan program pemerintah Amerika Serikat yang memungkinkan penjualan alutsista dan layanan pertahanan seperti pelatihan, perawatan, serta dukungan logistik kepada negara mitra melalui mekanisme *government-to-government sales*, di mana dalam mekanisme ini, pemerintah Amerika Serikat berperan sebagai perantara langsung antara industri pertahanan domestik Amerika Serikat dan negara mitra yang ingin membeli, sekaligus sebagai penjamin agar proses pengadaan tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (DSCA 2018).

Berdasarkan dari pengertian tersebut, FMS dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tina S. Kaidanow, pejabat Asisten Sekretaris Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri pada masa pemerintahan Trump, menegaskan bahwa setiap transfer senjata Amerika Serikat pada dasarnya merupakan bagian dari implementasi kebijakan luar negeri, yang mana melalui FMS Washington tidak hanya mentransfer alutsista tetapi juga membangun kemitraan strategis jangka panjang, mengirimkan sinyal komitmen

kepada negara mitra, serta membentuk keseimbangan kekuatan di kawasan sesuai dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat (Kaidanow 2017).

Mekanisme FMS diatur dalam Arms Export Control Act (AECA) dan Foreign Assistance Act (FAA), yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan program FMS serta memastikan bahwa setiap penjualan persenjataan selaras dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan Amerika Serikat. Secara umum, ketentuan yang ditetapkan dalam FAA dan AECA biasanya berlaku bagi mayoritas negara mitra Amerika Serikat yang menerima bantuan pertahanan atau melakukan pembelian alutsista melalui mekanisme FMS. Namun, terdapat pengecualian khusus untuk beberapa negara mitra tertentu yang dipandang memiliki signifikansi strategis bagi Amerika Serikat, dan Taiwan adalah salah satu negara yang dipandang memiliki signifikansi tersebut. Alih-alih tunduk sepenuhnya pada rezim FAA dan AECA, hubungan kerja sama pertahanan Amerika Serikat dengan Taiwan sudah diatur secara khusus melalui TRA. Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban bagi Amerika Serikat untuk menyediakan alutsista dan layanan pertahanan dalam jumlah yang diperlukan agar Taiwan dapat mempertahankan kapasitas pertahanan diri yang memadai. Jenis dan jumlah dukungan tersebut ditentukan oleh Presiden dan Kongres Amerika Serikat berdasarkan penilaian atas kebutuhan pertahanan Taiwan, serta tetap dilaksanakan melalui mekanisme FMS sebagai prosedur resmi pengadaan dan penjualan alutsista (Arabia and Vassalotti 2023, 4-5).

Di bawah pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat telah menyetujui berbagai paket penjualan alutsista kepada Taiwan melalui mekanisme FMS dengan nilai kumulatif sekitar \$8,35 miliar. Untuk melihat bentuk konkret dari

pembangunan kapabilitas tersebut, berikut uraian paket-paket FMS yang disetujui pada masa pemerintahan Biden yang disusun secara kronologis:

Tabel 1.1 Rincian Paket FMS pada Masa Biden (2021-2024)

Tanggal	Rincian Paket FMS	Nilai Estimasi
4 Agustus 2021	40 M109A6 Paladin <i>self-propelled howitzer</i> , termasuk kendaraan pendukung, senjata, suku cadang, dan layanan	\$750 juta
7 Februari 2022	Layanan dukungan teknik untuk sistem Patriot	\$100 juta
5 April 2022	Bantuan teknis kontraktor untuk sistem Patriot	\$95 juta
8 Juni 2022	Suku cadang kapal dan sistem kapal	\$120 juta
15 Juli 2022	Dukungan teknis untuk tank dan kendaraan tempur, termasuk suku cadang.	\$108 juta
2 September 2022	Dukungan logistik untuk Program Radar Pengawasan; 60 rudal AGM-84L-1 Harpoon Block II; 100 rudal AIM-9X Block II Sidewinder.	\$1,106 miliar
6 September 2022	Suku cadang standar dan non-standar untuk pesawat (F-16, C-130, IDF, dll)	\$428 juta
28 Desember 2022	Sistem anti-tank Volcano, termasuk amunisi dan layanan dukungan	\$180 juta
1 Maret 2023	Amunisi untuk pesawat tempur <i>multirole</i> F-16	\$619 juta
29 Juni 2023	Amunisi 30mm untuk kendaraan lapis baja CM-34 dan dukungan suplai untuk kendaraan roda dan senjata	\$440,2 juta
23 Agustus 2023	Sistem <i>infrared search and track</i> (IRST) untuk F-16	\$500 juta
15 Desember 2023	Dukungan siklus hidup <i>Command, Control, Communications, and Computers</i> (C4)	\$300 juta
21 Februari 2024	Peningkatan sistem data link taktis lanjutan (CDS, GPS, dll)	\$75 juta

5 Juni 2024	Suku cadang standar dan non-standar untuk F-16	\$300 juta
18 Juni 2024	720 Switchblade 300 <i>loitering munitions</i> dan 291 ALTIUS 600M-V UAV	\$360,2 juta
16 September 2024	Pengembalian, perbaikan, dan pengiriman ulang suku cadang pesawat	\$228 juta
25 Oktober 2024	3 sistem NASAMS dengan 123 rudal dan radar AN/TPS-77 dan AN/TPS-78	\$1,988 miliar
29 November 2024	Suku cadang F-16 dan radar AESA; <i>Improved Mobile Subscriber Equipment (IMSE)</i>	\$385 juta
20 Desember 2024	Modernisasi C4 (309 radio MIDS JTRS); 16 <i>gun mounts</i> MK 75 76mm	\$295 juta

Sumber: (Forum on the Arms Trade, n.d.; Stockholm International Peace Research Institute, n.d.; US-Taiwan Defense and National Security 2025; Gomez and O'Connor 2025)

Data-data ini diambil dari sumber-sumber terverifikasi, seperti DSCA, SIPRI, US-Taiwan Business Council (USTBC) National Defense and National Security, Taiwan Security Monitor (TSM), dan *Forum on the Arms Trade*. Sumber-sumber tersebut saling melakukan *cross-reference* dan pada dasarnya semuanya merujuk pada data utama dari DSCA. Namun, ada beberapa paket yang mengalami perubahan pemesanan, seperti pembatalan pengadaan 40 M109A6 Paladin *self-propelled howitzers* yang kemudian digantikan dengan tambahan 18 sistem HIMARS *multiple rocket launcher systems* setelah melihat efektivitasnya dalam perang Ukraina (Everington 2022). Selain itu, sebagian produksi amunisi 30mm untuk kendaraan CM-34 dialihkan menjadi skema produksi bersama antara

industri pertahanan Amerika Serikat dan Taiwan yang akan dimulai pada 2026 (Gomez and O'Connor 2025).

Penjualan alutsista Amerika Serikat kepada Taiwan pada dasarnya berfungsi sebagai alat strategis untuk menunjukkan kesediaan dan kemampuan Washington untuk terlibat dalam isu Taiwan sekaligus menjaga keseimbangan kekuatan yang dinamis di Selat Taiwan. Pola penjualan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan strategi keamanan Indo-Pasifik Amerika Serikat, strategi rantai pulau Pasifik Barat, serta strategi pertahanan Taiwan, yang mana Washington secara konsisten menggunakan FMS sebagai instrumen tekanan terhadap Tiongkok dengan menyesuaikan waktu dan ritme penjualannya berdasarkan dinamika persaingan kedua negara, sehingga FMS berfungsi sebagai barometer kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok secara keseluruhan. Di bawah pemerintahan Biden, dimensi ini semakin menguat karena Biden menempatkan Tiongkok sebagai rival sistemis dan secara bertahap merumuskan strategi deterens baru, yang mana FMS menjadi salah satu instrumen utamanya (Shushen 2022, 1-4).

Orientasi strategis ini tidak terlepas dari logika deterens yang mendasarinya, yang mana pendekatan deterens berbasis penyangkalan (*deterrence by denial*), yang mana bekerja dengan meyakinkan pihak agresor bahwa tujuannya tidak akan tercapai sehingga mendorong pihak yang ditangkal untuk menghitung ulang kalkulasi untung-ruginya sebelum bertindak. Dalam konteks ancaman Tiongkok, pesatnya modernisasi militer Tiongkok telah membuat kehadiran Amerika Serikat di Pasifik Barat semakin rentan akibat kapabilitas A2/AD yang mengancam posisi Amerika Serikat di rantai pulau pertama, yang mana kondisi

ini mendorong strategi militer Amerika Serikat untuk semakin berorientasi pada denial dengan menjadikan kapabilitas militer Tiongkok sebagai sasaran utama, dan di bawah pemerintahan Biden orientasi ini semakin menguat melalui penekanan pada pengerahan kekuatan baru dan koordinasi penyangkalan bersama aliansi regional sebagai elemen kunci dalam strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat terhadap Tiongkok (Xi and Tengfei 2022, 2-7).

Logika deterens berbasis penyangkalan inilah yang turut membentuk komposisi penjualan alutsista Amerika Serikat kepada Taiwan, terutama ketika dihadapkan pada realitas ketimpangan kapabilitas militer yang sangat mencolok antara Taiwan dan Tiongkok. Amerika Serikat menyadari bahwa Taiwan tidak berada dalam posisi untuk menandingi kekuatan militer Tiongkok secara konvensional dalam waktu dekat, terlebih dengan anggaran pertahanan yang jauh lebih terbatas, yakni sekitar \$16,5 miliar pada tahun 2024. Angka tersebut sangat tidak sebanding jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan Tiongkok yang hampir 19 kali lebih besar, yakni sekitar \$314 miliar pada tahun yang sama (Liang et al. 2025).

Ketimpangan struktural inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintahan Biden dalam menyetujui paket FMS untuk Taiwan. Alih-alih mendorong pembangunan kekuatan konvensional yang membutuhkan biaya besar, penjualan FMS di bawah Biden lebih difokuskan pada alutsista yang bersifat asimetri yang dinilai lebih realistis, lebih terjangkau, sekaligus mampu memberikan efek deterens yang lebih signifikan. Pendekatan ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan cost of aggression bagi Beijing, dengan memaksa Tiongkok untuk menghitung ulang kalkulasi strategisnya terhadap Taiwan

sebelum mengambil langkah yang lebih agresif (Wong and Qin 2022; Campbell 2025).

Pola ini semakin tampak jelas ketika dibandingkan dengan pemerintahan Donald Trump. Pada masa Trump, persetujuan penjualan lebih banyak diarahkan pada platform persenjataan konvensional, dengan nilai mencapai sekitar \$10,4 miliar, jauh melampaui penjualan alutsista berkapabilitas asimetris pada masa Biden yang selisihnya mencapai sekitar \$6,5 miliar. Perbedaan ini juga terlihat pada total keseluruhan nilai penjualan senjata dan layanan pemeliharaan: pemerintahan Trump mengumumkan penjualan senilai sekitar \$18,2 miliar, sementara Biden hanya sekitar \$8,35 miliar (Gomez and Giltner 2023).

Namun angka yang lebih kecil itu tidak serta-merta mencerminkan komitmen yang lebih lemah. Perbedaan tersebut justru menunjukkan pergeseran orientasi yang lebih mendasar, di mana di bawah Biden, FMS tidak lagi sekadar dipahami sebagai instrumen dukungan pertahanan bagi Taiwan, melainkan dirancang secara aktif untuk membentuk dan membatasi perilaku strategis Tiongkok itu sendiri. Bukan hanya soal memperkuat Taiwan, tetapi soal memastikan bahwa setiap kalkulasi agresif Beijing menghadapi biaya dan risiko yang tidak dapat diabaikan. Dalam logika inilah FMS berfungsi sebagai instrumen struktural yang membatasi ruang gerak ekspansionisme Tiongkok, karena penguatan kapabilitas asimetris Taiwan memperbesar risiko operasional dan politik yang harus diperhitungkan Beijing sebelum mengambil langkah militer apa pun. Dengan demikian, FMS dapat dipahami bukan sekadar sebagai program jual beli alutsista saja, melainkan sebagai instrumen deterens yang secara aktif dan terukur diarahkan untuk mengubah kalkulasi strategis Tiongkok terhadap Taiwan.

2.4 Respons Tiongkok terhadap Penjualan Senjata Amerika Serikat

Langkah-langkah Amerika Serikat dalam memperkuat posisi Taiwan melalui kebijakan strategis dan paket FMS selama era Biden tidak luput dari perhatian Beijing. Dari perspektif Beijing, penjualan senjata Amerika Serikat terhadap melalui FMS ini dipandang sebagai bentuk campur tangan eksternal yang berpotensi mengubah keseimbangan status quo di Selat Taiwan. Dalam berbagai pernyataan resmi, Beijing melayangkan protes atas berlanjutnya penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan, yang dinilai melanggar One China Policy serta mengganggu perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Seperti contohnya pada 2 September 2022, ketika pemerintah Amerika Serikat menyetujui paket penjualan rudal AGM-84L-1 Harpoon Block II dan rudal AIM-9X Block II Sidewinder yang bernilai lebih dari \$1,1 miliar kepada Taiwan. Beijing menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang berpotensi merusak hubungan bilateral sekaligus mengganggu stabilitas di Selat Taiwan (Stevenson 2022). Ini terjadi tak lama setelah kejadian Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, beserta dengan beberapa anggota Kongres mengunjungi Taiwan pada 2 Agustus 2022, yang mana hal tersebut, memicu latihan militer besar-besaran oleh Tiongkok (Wingfield 2022).

Seiring dengan menurunnya penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan, Beijing pun terus melayangkan keberatannya atas keberlanjutan penjualan senjata tersebut. Pemerintah Tiongkok beberapa kali memperingatkan akan mengambil langkah balasan, seperti contohnya pada 18 September 2024, pemerintah Tiongkok menjatuhkan sanksi terhadap 9 perusahaan pertahanan Amerika Serikat

yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan (Khaliq 2024). Pada 25 Oktober 2024, pemerintah Amerika Serikat menyetujui lagi sebuah paket penjualan sistem pertahanan udara NASAMS beserta dengan amunisinya yang bernilai lebih dari \$1,988 miliar. Beijing secara terbuka mengancam keputusan tersebut dan berjanji akan ada pembalasan. Pemerintah Tiongkok menilai paket tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya (Zeyuan 2024).

Memasuki periode akhir pemerintahan Biden, sekitar Desember 2024, pemerintah Tiongkok kembali mengecam langkah Amerika Serikat yang menyetujui penjualan paket modernisasi C4, termasuk 309 radio MIDS JTRS, 76 mm MK 75 gun mounts kepada Taiwan dengan nilai sekitar \$295 juta. Beijing memperingatkan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan yang “bermain dengan api” dan berpotensi meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan (AP News 2024).

Berdasarkan respons yang ditunjukkan Beijing, dapat dilihat bahwa pola reaksi Tiongkok relatif konsisten, yang mana umumnya berupa kecaman diplomatik, peringatan politik, serta sanksi terbatas. Peningkatan aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan memang sering muncul beriringan dengan momentum kebijakan Amerika Serikat, namun dalam konteks tahun 2022, lonjakan aktivitas tersebut lebih berkaitan langsung dengan kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan dibandingkan dengan paket penjualan senjata itu sendiri. Kunjungan tersebut dipandang Beijing sebagai pelanggaran terberat terhadap One China Policy, sehingga memicu latihan militer berskala besar tersebut untuk menunjukkan sinyal penolakan keras atas langkah tersebut.

BAB 3

FOREIGN MILITARY SALES SEBAGAI INSTRUMEN DETERENS AMERIKA SERIKAT TERHADAP TIONGKOK

3.1 Foreign Military Sales dalam Kerangka Komitmen Strategis Amerika Serikat terhadap Taiwan

Dalam bukunya “World Politics in a New Era” (1995), Steven L. Spiegel, mengemukakan bahwa deterens yang efektif menuntut adanya komitmen yang jelas dari negara penangkal ketika menghadapi ancaman. Komitmen disini merujuk pada sikap tegas dan terbuka untuk menetapkan “garis merah” yang tidak boleh dilanggar, disertai pesan atau tindakan konkret bahwa setiap pelanggaran akan memicu pembalasan serius, baik politik, diplomatik, ekonomi, maupun militer. Dengan demikian, komitmen dalam deterens merujuk pada kemampuan negara menyampaikan batas-batas secara konsisten dan tidak ambigu, serta menunjukkan kesediaan mengambil tindakan balasan yang menimbulkan efek jera. Spiegel menekankan bahwa komitmen yang ambigu justru berbahaya, karena dapat membuat agresor gagal menangkap sinyal peringatan. Contohnya dapat dilihat pada krisis Falkland 1982, ketika Inggris tidak memberikan pesan jelas tentang konsekuensi terhadap Argentina. Akibatnya, Argentina mencaplok kepulauan tersebut dan pecahlah Perang Falkland (Spiegel 1995, 511–512).

Namun, penerapan kerangka komitmen Spiegel dalam konteks hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan menghadirkan satu pertentangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan selama ini dibangun di atas prinsip

strategic ambiguity, di mana Washington secara sengaja tidak memberikan kepastian apakah akan melakukan intervensi militer langsung jika Taiwan diserang, sekaligus membatasi langkah Taiwan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak (Grzegorzewski 2022, 60-61). Sekilas, hal ini tampak bertentangan dengan tuntutan Spiegel bahwa komitmen tidak boleh ambigu.

Akan tetapi, pertentangan ini dapat diselesaikan. Pertama, perlu dibedakan bahwa *strategic ambiguity* dan komitmen Amerika Serikat melalui FMS beroperasi pada dua level yang berbeda. *Strategic ambiguity* beroperasi pada level kepastian intervensi militer langsung, dan di sinilah ambiguitas itu memang sengaja dipelihara. Sementara itu, Spiegel sendiri tidak mensyaratkan kepastian intervensi militer sebagai ukuran komitmen, melainkan keseriusan sinyal dan konsistensi tindakan nyata (Spiegel 1995, 511-512).

Pada level inilah FMS bekerja, dan yang menjadikannya semakin tidak ambigu adalah bahwa setiap paket FMS yang disetujui bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan pemenuhan kewajiban hukum yang secara eksplisit diamanatkan oleh TRA kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan sarana pertahanan yang memadai bagi Taiwan (Arabia and Vassalotti 2023, 4-5). Program FMS ke Taiwan ini adalah bukti nyata bahwa Amerika Serikat memandang keamanan Taiwan sebagai kepentingan serius yang layak dipertahankan, bahkan ketika harus menanggung tekanan diplomatik dari Beijing. Justru kombinasi antara ambiguitas pada level intervensi langsung dan kejelasan pada level tindakan nyata inilah yang membuat posisi Amerika Serikat sulit dikalkulasi oleh Beijing, karena Tiongkok tidak bisa mengabaikan komitmen yang sudah terwujud secara konkret di lapangan, tetapi juga tidak bisa memastikan

seberapa jauh Amerika Serikat akan melangkah jika konflik benar-benar pecah. Keduanya dengan demikian bekerja dalam satu kerangka deterens yang saling melengkapi.

Kedua, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, *strategic ambiguity* di era Biden sendiri mengalami pergeseran arah yang signifikan, di mana ambiguitas tersebut dalam praktiknya lebih diarahkan kepada Tiongkok, bukan lagi kepada Taiwan, seiring dengan meningkatnya nilai strategis Taiwan sebagai mitra dagang utama dan eksportir semikonduktor terbesar di dunia yang menjadi aset kunci dalam persaingan teknologi Amerika Serikat dengan Tiongkok (Lestari and Yusran 2023, 119). Artinya, tidak hanya FMS yang mengisi kekosongan kejelasan yang ditinggalkan *strategic ambiguity*, tetapi *strategic ambiguity* itu sendiri pun sudah bergeser menjadi lebih jelas dalam hal keberpihakan Washington terhadap Taiwan. Kombinasi keduanya inilah yang menjadikan komitmen Amerika Serikat di era Biden semakin kokoh dan semakin sulit diabaikan oleh Beijing, serta semakin sejalan dengan apa yang dimaksud Spiegel sebagai komitmen yang efektif dalam deterens.

Komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak berdiri di atas satu dokumen saja, melainkan dibangun secara berlapis dari waktu ke waktu. Fondasi utamanya adalah TRA 1979, yang mana undang-undang tersebut secara eksplisit mewajibkan Amerika Serikat untuk menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan agar mampu mempertahankan diri dari tekanan eksternal (Arabia and Vassalotti 2023, 4-5). Komitmen ini kemudian diperkuat melalui *Six Assurances* pada Agustus 1982, yang mana jaminan tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menetapkan batas waktu penghentian penjualan senjata kepada Taiwan,

tidak akan berkonsultasi dengan Beijing mengenai penjualan tersebut, tidak akan mengubah TRA, serta tidak akan menekan Taiwan untuk bernegosiasi dengan Tiongkok. Bersama TRA, enam jaminan tersebut membentuk kerangka komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan Taiwan (Sacks et al. 2023, 17-21). Dalam kerangka Spiegel, kombinasi TRA dan *Six Assurances* ini menjadi sumber komitmen yang kuat karena bersifat institusional dan tidak bergantung pada siapa presiden yang sedang menjabat.

Di bawah pemerintahan Biden, fondasi hukum ini semakin diperkuat melalui serangkaian undang-undang tambahan, seperti Taiwan Policy Act 2022, Taiwan Conflict Deterrence Act 2023, Taiwan Non-Discrimination Act 2023, Taiwan Assurance Act, dan Taiwan Assurance Implementation Act, yang mana undang-undang tersebut secara keseluruhan memberikan kerangka bantuan keamanan yang lebih luas bagi Taiwan dalam menghadapi potensi gangguan dari Tiongkok (Liu 2023, 2). Penambahan legislasi ini menunjukkan kepada Beijing bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, melainkan terus menguat dari waktu ke waktu.

Selain itu, komitmen ini terlihat dari pola penjualan FMS selama 2021-2024 yang konsisten dan tidak pernah berhenti. Sebagaimana tercermin dalam data pada Tabel 1.1, penjualan alutsista tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terdistribusi secara merata sepanjang masa jabatan Biden dengan total 19 paket selama empat tahun. Dalam kerangka Spiegel, konsistensi seperti ini bukan sekadar formalitas saja, tetapi pesan jangka panjang yang terus-menerus dikirimkan kepada pihak lawan. Yang lebih penting lagi adalah keterkaitan antara waktu pengumuman paket FMS dengan situasi yang sedang terjadi di lapangan.

Hal ini paling jelas terlihat pada September 2022, ketika pemerintahan Biden menyetujui dua paket sekaligus, yaitu paket rudal Harpoon dan Sidewinder senilai lebih dari \$1,1 miliar pada 2 September, diikuti paket suku cadang pesawat senilai \$428 juta pada 6 September, yang mana keduanya diumumkan tidak lama setelah Tiongkok melancarkan latihan militer besar-besaran sebagai respons atas kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022 (Stevenson 2022; Wingfield 2022). Pola ini menunjukkan bahwa setiap kali Beijing meningkatkan tekanan terhadap Taiwan, Washington langsung merespons dengan menyetujui paket FMS baru, yang mana hal tersebut membuat Beijing tidak bisa menafsirkan diam Washington sebagai tanda persetujuan.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui pernyataan langsung para pejabat pemerintahan Biden. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Biden secara terbuka menyatakan kesiapan Amerika Serikat untuk membantu Taiwan apabila terjadi serangan militer dari Tiongkok (Wees 2021; Liptak 2022; Liptak, Judd, and Gan 2022; Gittleson and Carlson 2022; Chen 2024; Johnson 2024). Meskipun Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan resmi terhadap One China Policy, pernyataan Biden yang terus diulang di berbagai forum menunjukkan bahwa hal tersebut bukan kekeliruan, melainkan memang mengisyaratkan pesan yang disengaja (Anwar and Azam 2026, 1416). Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan Koordinator Indo-Pasifik Kurt Campbell pun turut mengonfirmasi bahwa pernyataan Presiden Biden memang memiliki bobot strategis yang nyata (Bao 2023, 205).

Selain itu, diundangnya perwakilan *de facto* Taiwan, Hsiao Bi-khim, dalam acara pelantikan Presiden Biden juga menjadi sinyal dukungan politik yang

jasas kepada Taipei (Kuehn 2021, 5-6). Lebih jauh lagi, pemerintahan Biden menempatkan Taiwan dalam dokumen National Security Strategy sebagai bagian dari komunitas demokrasi dalam persaingan global antara demokrasi dan otokrasi, yang mana hal tersebut menjadikan komitmen terhadap Taiwan bukan lagi sekadar soal kepentingan strategis saja, tetapi juga soal nilai yang terus dipertahankan Washington di berbagai forum internasional termasuk pertemuan G7 (Biden 2025; Kuehn 2021, 5-6). Dengan demikian, komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan di era Biden sudah memenuhi apa yang disyaratkan Spiegel sebagai komitmen yang efektif dalam deterens. Komitmen tersebut tidak hanya sebatas pernyataan, melainkan terwujud secara nyata melalui kewajiban hukum yang mengikat, pola penjualan FMS yang konsisten dan responsif, serta pernyataan pejabat yang terkoordinasi, yang mana keseluruhannya mengirimkan pesan yang jelas kepada Beijing bahwa setiap upaya perubahan status quo secara paksa akan menghadapi konsekuensi yang serius.

3.2 Kapabilitas Amerika Serikat sebagai Fondasi Deterens terhadap Tiongkok

Selain komitmen yang jelas, Spiegel juga mengatakan bahwa deterens yang efektif juga memerlukan kapabilitas yang memadai. Kapabilitas disini merujuk pada kemampuan nyata negara penangkal untuk melaksanakan tindakan pembalasan apabila batas-batas yang telah ditetapkan dilanggar. Dengan kata lain, ancaman pembalasan hanya akan dianggap serius apabila didukung oleh kekuatan militer, teknologi, dan sumber daya yang memungkinkan negara penangkal benar-benar merealisasikan ancaman tersebut (Spiegel 1995, 512-513).

Dalam konteks deterrens Amerika Serikat terhadap Tiongkok atas Taiwan, kapabilitas yang dimaksud Spiegel pertama-tama merujuk pada kemampuan militer Amerika Serikat itu sendiri di kawasan. Amerika Serikat memiliki sekitar 375.000 personel militer yang tersebar di setidaknya 66 pangkalan di kawasan Indo-Pasifik, yang mana kehadiran militer tersebut menempatkan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang secara nyata mampu merespons apabila stabilitas di Selat Taiwan terganggu (Nicastro 2023, 1).

Lebih dari sekadar kehadiran, Amerika Serikat juga memiliki kapabilitas operasional yang secara langsung mempersulit kalkulasi militer Tiongkok terhadap Taiwan. Kapal selam nuklir Amerika Serikat yang sangat senyap memiliki kemampuan untuk beroperasi di Selat Taiwan tanpa bisa dicegah oleh kekuatan anti-kapal selam Tiongkok, sementara pesawat *bomber* strategis Amerika Serikat yang dipersenjatai rudal anti-kapal jarak jauh dapat beroperasi dari pangkalan di rantai pulau kedua seperti Guam untuk mengancam kapal-kapal amfibi Tiongkok. Kombinasi kapabilitas ini menjadikan operasi invasi amfibi berskala besar Tiongkok terhadap Taiwan sebagai sesuatu yang sangat berisiko secara operasional, karena Amerika Serikat tetap mampu menghancurkan armada pengangkut pasukan Tiongkok bahkan tanpa harus hadir secara langsung di Selat Taiwan (Cote Jr 2022, 66-67).

Di bawah pemerintahan Biden, kapabilitas ini secara aktif diperkuat melalui investasi besar-besaran dalam program persenjataan presisi jarak jauh sebagai bagian dari pendekatan *deterrence by denial*. Pemerintahan Biden mengalokasikan anggaran sebesar \$409 juta untuk program rudal jarak menengah baru pada tahun anggaran 2023, yang mana angka tersebut lima kali lebih besar

dibandingkan anggaran awal yang disediakan pemerintahan Trump pada tahun anggaran 2021. Program ini mencakup pengembangan versi berbasis darat dari rudal Tomahawk dan SM-6, yang mana rudal-rudal tersebut dirancang untuk membentuk jaringan serangan presisi di sepanjang rantai pulau pertama guna membatasi ruang gerak militer Tiongkok di kawasan. Selain itu, pemerintahan Biden juga mengalokasikan \$892 juta dalam anggaran pertahanan tahun anggaran 2023 untuk memperkuat pertahanan Guam, yang mana pangkalan tersebut dipandang sebagai pusat pertahanan rudal di rantai pulau kedua yang krusial bagi kemampuan proyeksi kekuatan Amerika Serikat di Pasifik Barat (Xi and Tengfei 2022, 13-15).

Namun, kapabilitas Amerika Serikat dalam kerangka deterens ini tidak hanya diukur dari kekuatan militernya sendiri. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, posisi geografis Taiwan yang terletak di antara Tiongkok dan sekutu Amerika Serikat seperti Jepang dan Filipina menjadikannya titik strategis yang apabila jatuh ke tangan Tiongkok akan secara langsung mengancam kemampuan Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatannya di kawasan (Khan 2024, 126). Dalam logika ini, menjaga Taiwan agar tetap mampu mempertahankan diri adalah bagian dari menjaga kapabilitas Amerika Serikat itu sendiri di kawasan Indo-Pasifik. Di sinilah FMS menjadi relevan sebagai perpanjangan kapabilitas Amerika Serikat, yang mana melalui program ini Amerika Serikat secara konkret membentuk kemampuan tempur dan kesiapan operasional Taiwan dalam menghadapi potensi ancaman dari Tiongkok (Campbell 2026, 2).

Berdasarkan data yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, paket FMS yang disetujui pada masa Biden didominasi oleh alutsista dengan karakteristik asimetris, yang mana karakteristik tersebut merujuk pada sistem persenjataan yang relatif lebih sederhana, berbiaya lebih rendah, dapat diproduksi secara massal, dan dirancang untuk memberikan efek maksimal terhadap lawan yang memiliki keunggulan konvensional (Gomez 2023; Gomez 2024). Pendekatan ini selaras dengan doktrin pertahanan Taiwan sendiri, yaitu Overall Defense Concept, yang mana doktrin tersebut menekankan pembangunan kemampuan perang asimetris sebagai inti strategi pertahanan dalam menghadapi kemungkinan serangan Tiongkok (Rizky and Salim 2025, 347).

Walaupun ketimpangan kekuatan militer antara Tiongkok dan Taiwan masih sangat besar, peningkatan kapabilitas asimetris Taiwan yang didukung melalui FMS ini memperumit perencanaan militer Tiongkok dengan cara meningkatkan daya tahan pertahanan Taiwan, memperbesar biaya invasi, serta memperpanjang kemampuan bertahan dalam fase awal konflik, yang mana kondisi tersebut memberi ruang bagi respons internasional termasuk keterlibatan langsung Amerika Serikat apabila diperlukan. Dengan demikian, kapabilitas Amerika Serikat sebagai negara penangkal dalam kerangka Spiegel tidak hanya mencakup kekuatan militer langsungnya di kawasan, tetapi juga kemampuannya untuk memperkuat Taiwan melalui FMS sedemikian rupa sehingga biaya invasi bagi Tiongkok menjadi semakin besar dan kalkulasi militer Beijing menjadi semakin sulit. Kombinasi antara kapabilitas militer Amerika Serikat yang kuat di kawasan dan penguatan asimetris Taiwan melalui FMS inilah yang membentuk

fondasi kapabilitas deterens Amerika Serikat terhadap Tiongkok sebagaimana yang disyaratkan Spiegel.

3.3 Kredibilitas Deterens Amerika Serikat di Mata Tiongkok

Unsur terakhir yang paling menentukan deterens efektif atau tidak, menurut Spiegel, adalah kredibilitas. Kredibilitas merujuk pada keyakinan pihak agresor bahwa negara penangkal benar-benar memiliki tekad politik, kesiapan operasional, dan konsistensi kebijakan untuk melaksanakan ancaman pembalasan jika batas tertentu dilanggar. Komitmen dan kapabilitas tidak akan berarti bila lawan meragukan kesungguhan ancaman tersebut. Karena itu, kredibilitas menjadi inti deterens, tanpa kredibilitas, komitmen hanyalah retorika semata, sementara kapabilitas dipandang sebagai potensi pasif saja. Kredibilitas sendiri dibangun secara berkelanjutan melalui citra, reputasi, dan rekam jejak tindakan di masa lalu, sehingga menuntut konsistensi antara pernyataan politik, komitmen hukum, dan aksi nyata. Ancaman deterens hanya dipandang serius bila negara penangkal tidak sekadar menetapkan garis batas, tetapi juga menunjukkan kesiapan menanggung konsekuensi strategis jika batas itu dilanggar. Dengan kata lain, kredibilitas lahir dari pola perilaku yang konsisten, sehingga pihak lawan dapat memperkirakan bahwa pembalasan bukan sekadar kemungkinan, melainkan kepastian apabila provokasi terjadi (Spiegel 1995, 513-514).

Dalam konteks deterens Amerika Serikat terhadap Tiongkok atas Taiwan, kredibilitas tersebut dibangun melalui keselarasan antara pernyataan kebijakan dan tindakan nyata yang sudah diuraikan pada dua subbab sebelumnya. Komitmen hukum melalui TRA dan *Six Assurances*, konsistensi paket FMS yang

terus mengalir sepanjang era Biden, hingga pernyataan langsung Presiden Biden yang dikonfirmasi oleh pejabat seniornya, semuanya berkontribusi pada pembentukan citra Amerika Serikat sebagai negara penangkal yang serius dan tidak mudah digoyahkan. Namun, kredibilitas dalam kerangka Spiegel tidak dinilai dari perspektif negara penangkal itu sendiri, melainkan dari bagaimana pihak yang ditangkal, dalam hal ini Tiongkok, mempersepsikan dan merespons sinyal-sinyal tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai kredibilitas deterens Amerika Serikat secara lebih akurat, perlu dilihat bagaimana Tiongkok merespons kebijakan FMS era Biden dan apakah perilaku militer Tiongkok menunjukkan tanda-tanda bahwa deterens tersebut diperhitungkan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, respons Tiongkok terhadap paket-paket FMS era Biden umumnya berupa kecaman diplomatik, peringatan politik, dan sanksi terbatas terhadap perusahaan pertahanan Amerika Serikat yang terlibat (Khaliq 2024; Zeyuan 2024; AP News 2024). Pola respons ini relatif konsisten dan terbatas pada jalur diplomatik, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok memilih untuk tidak mengambil langkah militer langsung sebagai respons terhadap penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan. Dalam kerangka Spiegel, pola respons yang terbatas ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Beijing memang memperhitungkan komitmen dan kapabilitas Amerika Serikat, sehingga memilih jalur yang tidak berisiko memicu konfrontasi langsung.

Namun, gambaran ini menjadi lebih kompleks ketika melihat tren aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan secara keseluruhan selama periode yang sama. Data menunjukkan bahwa pelanggaran zona ADIZ oleh PLA terus meningkat dari

240 kali pada 2021 menjadi 269 kali pada 2022, kemudian 271 kali pada 2023, dan mencapai 313 kali pada 2024, dengan total setidaknya 3.000 sorti sepanjang 2024 saja, yang mana angka tersebut merupakan peningkatan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan 2021. Selain itu, Tiongkok juga melancarkan latihan militer berskala besar pada Agustus 2022, April 2023, Mei 2024 melalui Joint Sword 2024A, dan Oktober 2024 melalui Joint Sword 2024B, yang mana latihan terakhir ini bahkan mencatat rekor pengerahan 153 pesawat militer secara bersamaan ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dalam satu hari (Lin et al. 2026).

Namun penting untuk digarisbawahi bahwa peningkatan aktivitas militer Tiongkok tersebut tidak secara langsung berkorelasi dengan paket FMS yang disetujui Amerika Serikat. Sebagaimana sudah diuraikan pada bab sebelumnya, eskalasi militer Tiongkok di sekitar Taiwan lebih banyak dipicu oleh perkembangan politik di Taiwan, yang dipandang Beijing sebagai ancaman terhadap One China Policy, bukan semata sebagai reaksi terhadap penjualan senjata itu saja. Seperti, latihan militer besar-besaran Agustus 2022 dipicu oleh kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan, latihan April 2023 dipicu oleh pertemuan Presiden Tsai dengan Kevin McCarthy di California, sementara latihan Joint Sword 2024A dipicu oleh pidato pelantikan Presiden Lai Ching-te yang menegaskan bahwa Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tidak saling berada di bawah satu sama lain, dan Joint Sword 2024B dipicu oleh serangkaian pernyataan Lai yang dipandang Beijing sebagai cerminan dari teori dua negara (Chen 2025, 3-4). Dengan kata lain, pemicu utama eskalasi militer Tiongkok adalah dinamika politik lintas Selat Taiwan, bukan paket FMS itu sendiri.

Meski demikian, fakta bahwa aktivitas militer Tiongkok terus meningkat meskipun FMS terus berjalan menunjukkan adanya keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Tiongkok memang tidak mengambil langkah militer langsung terhadap Taiwan, tetapi perilakunya juga tidak bisa disebut sebagai perilaku pihak yang benar-benar tercegah secara penuh. Hal ini dapat dilihat dengan bergesernya pendekatan Tiongkok ke pendekatan yang disebut sebagai operasi zona abu-abu atau *gray zone operations*. Operasi zona abu-abu ini bertujuan mengikis daya tahan Taiwan, mempersempit ruang gerak politiknya, serta menggeser keseimbangan persepsi secara bertahap tanpa memancing respons militer penuh dari Amerika Serikat (Lee, Lague, and Blanchard 2020). Dengan kata lain, Tiongkok secara kalkulatif menghindari tindakan yang akan langsung mengaktifkan konsekuensi deterens Amerika Serikat, tetapi tetap berupaya mengubah keseimbangan status quo melalui cara-cara yang lebih sulit untuk direspons secara tegas dan jelas. Pemilihan strategi ini oleh Tiongkok sendiri sesungguhnya juga merupakan bukti tidak langsung bahwa kredibilitas deterens Amerika Serikat bekerja pada suatu level, karena Beijing masih menilai biaya konflik langsung terlalu besar untuk ditanggung.

Operasi zona abu-abu yang dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan sendiri mencakup berbagai bentuk tekanan yang dirancang untuk tetap berada di bawah ambang konfrontasi terbuka. Setidaknya terdapat tiga kategori utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, di domain udara, Angkatan Udara PLA (PLAAF) secara rutin melakukan pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara Taiwan tanpa izin dengan frekuensi yang terus meningkat setiap tahunnya, yang mana sepanjang 2024 saja tercatat setidaknya 3.000 sorti, meningkat lebih dari tiga kali lipat

dibandingkan 2021. Kedua, di domain maritim, Tiongkok menggunakan kapal penjaga pantai (China Coast Guard/CCG) untuk melakukan patroli di sekitar pulau-pulau terluar Taiwan seperti Kinmen dengan dalih penegakan hukum, yang mana hal ini dipicu oleh insiden tenggelamnya perahu Tiongkok pada Februari 2024 yang dijadikan Beijing sebagai justifikasi untuk memperketat kehadiran maritimnya di area tersebut. Di bawah laut, Tiongkok juga diduga terlibat dalam pemotongan kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Taiwan dengan pulau-pulau terluarnya maupun jaringan global, yang mana insiden serupa terjadi pada Januari dan Februari 2025. Ketiga, di domain lain, Tiongkok juga menggunakan balon mata-mata yang terbang di atas wilayah Taiwan dengan skala yang menurut Kementerian Pertahanan Taiwan disebut sebagai yang terbesar yang pernah terjadi, terutama menjelang dan sesudah pemilihan presiden Taiwan 2024 (Grossman 2025, 2-8).

Menariknya, meskipun operasi zona abu-abu Tiongkok terus meningkat intensitasnya, tindakan-tindakan tersebut terbukti tidak efektif dalam mengubah sikap dan resolusi para pemimpin Taiwan. Latihan militer besar-besaran seperti Joint Sword 2024A maupun 2024B, tidak berhasil mencegah Presiden Lai untuk terus menegaskan kedudukan sejajar Taiwan dengan Tiongkok, maupun menghentikannya dari melanjutkan kunjungan ke negara-negara mitra. Setelah Joint Sword 2024B, Presiden Lai bahkan memimpin langsung delegasi kenegaraannya ke Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau, dengan singgah di wilayah Amerika Serikat di Hawaii dan Guam, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa latihan militer Tiongkok gagal mengubah cara Taiwan memposisikan dirinya di hadapan komunitas internasional (Chen 2025, 5-6). Pola

ini memperlihatkan bahwa tekanan zona abu-abu Tiongkok justru menghadapi tembok yang kokoh, karena Taiwan tidak sendirian dalam menghadapinya, melainkan didukung oleh komitmen dan kapabilitas Amerika Serikat yang terus diperkuat melalui FMS dan berbagai jalur lainnya sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian, penilaian akhir terhadap kredibilitas deterens Amerika Serikat melalui FMS di era Biden perlu dibaca secara bertingkat. Dalam kerangka Spiegel, kredibilitas deterens tidak diukur dari kemampuan mencegah setiap bentuk provokasi, melainkan dari kemampuan meyakinkan pihak lawan bahwa biaya tindakan paling ekstrem terlalu besar untuk ditanggung (Spiegel 1995, 513-514). Pada level inilah deterens Amerika Serikat dapat dinilai kredibel. Sepanjang periode 2021-2024, tidak ada invasi militer berskala penuh terhadap Taiwan, dan respons Tiongkok terhadap setiap paket FMS yang disetujui tetap terbatas pada jalur diplomatik. Lebih jauh lagi, pilihan Tiongkok untuk bergeser ke operasi zona abu-abu, alih-alih mengambil langkah militer langsung, justru secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa Beijing masih memperhitungkan komitmen dan kapabilitas Amerika Serikat sebagai sesuatu yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Ketidakefektifan operasi zona abu-abu tersebut dalam mengubah resolusi kepemimpinan Taiwan semakin memperkuat gambaran ini, karena Taiwan tetap berdiri kokoh dan tidak satu pun paket FMS berhenti mengalir sepanjang era Biden.

Namun demikian, kredibilitas tersebut tidak bisa dikatakan sempurna. Tiongkok terus meningkatkan tekanannya secara bertahap melalui cara-cara yang berada di bawah ambang respons militer langsung Amerika Serikat, yang mana

hal tersebut menunjukkan bahwa deterens Amerika Serikat belum sepenuhnya berhasil membentuk ulang kalkulasi strategis Beijing secara menyeluruh. Dalam kerangka Spiegel, kondisi ini mencerminkan batas alamiah dari deterens berbasis komitmen, kapabilitas, dan kredibilitas ketika berhadapan dengan aktor yang secara aktif mencari celah di antara garis-garis yang ditetapkan. Meski demikian, fakta bahwa Tiongkok masih memilih untuk tidak melampaui garis paling kritis tersebut tetap menjadi bukti paling konkret bahwa deterens Amerika Serikat, sebagaimana yang disyaratkan Spiegel, bekerja pada level yang paling menentukan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana Amerika Serikat menggunakan program Foreign Military Sales ke Taiwan pada tahun 2021-2024 sebagai deterens terhadap Tiongkok. Dengan menggunakan kerangka deterens Steven L. Spiegel yang menekankan tiga unsur utama, yaitu komitmen, kapabilitas, dan kredibilitas, penelitian ini menyimpulkan bahwa FMS era Biden berfungsi sebagai instrumen deterens yang memenuhi ketiga unsur tersebut, meskipun dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda di setiap levelnya.

Pada unsur komitmen, FMS era Biden terbukti bukan sekadar program jual beli alutsista biasa, melainkan merupakan perwujudan konkret dari komitmen hukum yang telah dibangun secara berlapis sejak TRA 1979 dan Six Assurances 1982, yang kemudian semakin diperkuat melalui serangkaian legislasi tambahan di era Biden. Konsistensi 19 paket FMS yang terdistribusi merata selama empat tahun, ditambah korelasi antara waktu pengumuman paket dengan dinamika provokasi militer Tiongkok, menunjukkan bahwa FMS digunakan sebagai instrumen komunikasi strategis yang aktif dan responsif, bukan pasif. Pertentangan antara logika komitmen Spiegel dan prinsip *strategic ambiguity* yang selama ini menjadi fondasi kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan dapat diselesaikan dengan memahami bahwa keduanya beroperasi pada level yang berbeda, di mana FMS bekerja pada level keseriusan dan konsistensi tindakan nyata yang justru tidak ambigu, sementara *strategic ambiguity* di era Biden sendiri

sudah bergeser lebih jelas dalam hal keberpihakan Washington terhadap Taiwan seiring meningkatnya nilai strategis Taiwan bagi kepentingan Amerika Serikat.

Pada unsur kapabilitas, deterens Amerika Serikat bertumpu pada dua lapisan yang saling menopang. Lapisan pertama adalah kapabilitas militer Amerika Serikat itu sendiri di kawasan, yang mencakup kehadiran 375.000 personel di setidaknya 66 pangkalan Indo-Pasifik, kemampuan kapal selam nuklir yang beroperasi tanpa bisa dicegah Tiongkok, hingga investasi besar-besaran dalam program rudal presisi jarak jauh senilai \$409 juta dan penguatan pertahanan Guam senilai \$892 juta pada tahun anggaran 2023. Lapisan kedua adalah penguatan asimetris Taiwan melalui FMS, yang mana paket-paket yang didominasi oleh alutsista asimetris dirancang untuk meningkatkan daya tahan pertahanan Taiwan, memperbesar biaya invasi, dan memperpanjang kemampuan bertahan dalam fase awal konflik sehingga memberi ruang bagi keterlibatan Amerika Serikat. Dalam kerangka Spiegel, kombinasi kedua lapisan ini membentuk kapabilitas deterens yang mempersulit kalkulasi militer Tiongkok secara nyata.

Pada unsur kredibilitas, penilaian perlu dibaca secara bertingkat. Pada level yang paling mendasar, yaitu mencegah invasi militer berskala penuh, deterens Amerika Serikat dapat dinilai kredibel karena tidak ada konflik militer terbuka yang terjadi sepanjang 2021-2024. Pilihan Tiongkok untuk bergeser ke operasi zona abu-abu, alih-alih mengambil langkah militer langsung, justru merupakan bukti tidak langsung bahwa Beijing masih memperhitungkan komitmen dan kapabilitas Amerika Serikat sebagai sesuatu yang nyata. Ketidakefektifan operasi zona abu-abu tersebut dalam mengubah resolusi

kepemimpinan Taiwan semakin memperkuat kesimpulan ini. Namun pada level yang lebih luas, yaitu mencegah segala bentuk tekanan dan perubahan status quo secara bertahap, deterens Amerika Serikat menghadapi keterbatasan yang nyata karena intensitas operasi zona abu-abu Tiongkok justru terus meningkat sepanjang periode yang sama.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa argumen sementara yang diajukan terbukti, yaitu FMS Amerika Serikat ke Taiwan pada 2021-2024 berfungsi sebagai instrumen deterens terhadap Tiongkok yang sesuai dengan ketiga unsur deterens Spiegel. Namun penting untuk dicatat bahwa efektivitas deterens ini bersifat parsial, dalam artian berhasil mencegah yang paling kritis tetapi belum mampu mengubah kalkulasi Beijing secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan batas alamiah dari instrumen deterens berbasis FMS ketika berhadapan dengan aktor yang secara aktif mencari celah di antara garis-garis yang ditetapkan melalui cara-cara yang berada di bawah ambang respons militer langsung.

4.2 Rekomendasi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis dengan menelaah dampak jangka panjang program Foreign Military Sales terhadap stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik, khususnya dengan mempertimbangkan dinamika persaingan kekuatan besar yang semakin kompleks. Penelitian ini masih berfokus pada peran Foreign Military Sales sebagai instrumen deterens dalam kerangka hubungan trilateral Amerika Serikat, Taiwan, dan Tiongkok, sehingga masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana kebijakan

tersebut memengaruhi perilaku aktor regional lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN yang turut terdampak oleh eskalasi keamanan di Selat Taiwan.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan analisis dengan mengintegrasikan perspektif militer operasional untuk menilai efektivitas nyata sistem persenjataan yang disalurkan melalui Foreign Military Sales dalam skenario konflik aktual. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui analisis simulasi konflik, studi doktrin militer, maupun evaluasi kesiapan interoperabilitas antara militer Amerika Serikat dan Taiwan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada dimensi kebijakan dan strategi, tetapi juga menilai sejauh mana peningkatan kapabilitas pertahanan Taiwan benar-benar mampu menghasilkan efek deterens yang efektif secara praktis.

Terakhir, penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi dimensi politik domestik baik di Amerika Serikat, Taiwan, maupun Tiongkok dalam membentuk arah program Foreign Military Sales. Analisis terhadap faktor domestik seperti dinamika partai politik, opini publik, serta kepentingan industri pertahanan berpotensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan dan konsistensi kebijakan deterens Amerika Serikat terhadap Taiwan. Pendekatan multidimensional tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai peran FMS dalam dinamika keamanan regional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitken, Aaron. 2013. "The Future of U.S.-Taiwan Arms Sales." *The Agora: Political Science Undergraduate Journal* 3, no. 1 (February): 3-13.
10.29173/agora19032.
- Anwar, Rabia, and Maryam Azam. 2026. "Shifting Dynamics in U.S-Taiwan Relations under the Biden Administration (2021–2025): Insights from Power Transition Theory." *ADVANCE SOCIAL SCIENCE ARCHIVE JOURNAL* 5, no. 1 (February): 1410-1425.
<https://assajournal.com/index.php/36/article/view/1438>.
- AP. 2024. "China says US is 'playing with fire' after latest military aid for Taiwan." *Associated Press World News*, December 22, 2024.
<https://apnews.com/article/china-taiwan-us-military-arms-sales-89a657717d0ef2d0565726d141a530a3>.
- Arabia, Christina L., and Michael J. Vassalotti. 2023. "Transfer of Defense Articles: U.S. Sale and Export of U.S.-Made Arms to Foreign Entities." *Congressional Research Service Report*, no. R46337 (March), 1-62.
<https://www.congress.gov/crs-product/R46337>.
- Babar, Summar I., and Abdul M. Khan. 2022. "CHINESE MILITARY MODERNIZATION UNDER XI: HARBINGER OF A NEW GREAT POWERS RIVALRY." *Asia-Pacific - Annual Research Journal of Far East & South East Asia* 40 (December): 43-63.
10.47781/asia-pacific.vol40.Iss0.5863.

- Bao, Xiao. 2023. "Biden's Policy toward Taiwan: Democracy Narrative and Strategic Competition." *Open Journal of Social Sciences* 11 (July): 198-207. 10.4236/jss.2023.117014.
- Bellocchi, Luke P. 2023. "The Strategic Importance of Taiwan to the United States and Its Allies: Part One." *Parameters* 53, no. 1 (May): 61-77. 10.55540/0031-1723.3223.
- Biden, Joseph R. 2025. "National Security Strategy 2022." National Security Strategy Archive. <https://nssarchive.us/national-security-strategy-2022/>.
- Budiana, Muhammad. 2023. "China's Rise: Implications for the International Political System." *Journal of Law, Social Science and Humanities* 1, no. 1 (October): 61-75. <https://myjournal.or.id/index.php/JLSSH/article/view/252>.
- Campbell, Caitlin. 2026. "Taiwan: Defense and Military Issues." *Congressional Research Service Report*, no. IF12481 (February), 1-3. <https://www.congress.gov/crs-product/IF12481>.
- Chávez Mazuelos, Jorge A. 2022. "The Chinese Dream of National Rejuvenation and Foreign Policy under Xi Jinping." *Agenda Internacional* 29, no. 40 (October): 31-55. 10.18800/agenda.202201.002.
- Chen, Dean P. 2024. "What to Make of Biden's Latest Promise to Defend Taiwan." *The Diplomat*, June 7, 2024. <https://thediplomat.com/2024/06/what-to-make-of-bidens-latest-promise-to-defend-taiwan/>.
- Chen, Yi-Chieh. 2025. "Assessing the Effectiveness of China's Military Exercises in Restraining Taiwan's Leadership." *Issue Brief*, (February), 1-9.

<https://www.isdp.eu/publication/assessing-the-effectiveness-of-chinas-military-exercises-in-restraining-taiwans-leadership/>.

Creswell, John W. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edited by Cheryl N. Poth. 4th ed. Thousand Oaks, Ventura: SAGE Publications.

Doyle, Gerry, Vijdan M. Kawoosa, and Arathy J. Aluckal. 2024. "Island in the crosshairs." *Reuters*, December 11, 2024.

<https://www.reuters.com/graphics/USA-CHINA/GUAM/myvmbqngnpr/>.

DSCA. 2018. "Foreign Customer Guide." Defense Security Cooperation Agency. <https://www.dsca.mil/Resources/Publications/Publication/Article/4049635/foreign-customer-guide>.

Everington, Keoni. 2022. "Taiwan to buy 18 more HIMARS from US amid Ukrainian wins." *Taiwan News*, August 31, 2022. <https://www.taiwannews.com.tw/news/4643514>.

Forum on the Arms Trade. n.d. "U.S. Arms Sales to Taiwan." Forum on the Arms Trade. <https://www.forumarmstrade.org/ustaiwan.html>.

Garofalo, Matteo. 2024. "Determining the Impact of the US Foreign Military Sales Program on the Proliferation of Democracy." *Journal of Strategic Security* 17, no. 4 (December): 23-31. 10.5038/1944-0472.17.4.2315.

Gittleson, Ben, and Adam Carlson. 2022. "Biden says, again, that US would defend Taiwan from Chinese invasion." *ABC News*, September 20, 2022. <https://abcnews.go.com/Politics/biden-us-defend-taiwan-chinese-invasion/story?id=90184808>.

- Gomez, Eric. 2023. "Taiwan's Urgent Need for Asymmetric Defense." Cato Institute.
<https://www.cato.org/policy-analysis/taiwans-urgent-need-asymmetric-defense>.
- Gomez, Eric. 2024. "Taiwan Arms Backlog, November 2024 Update: HIMARS Delivery and a Second Trump Administration." Cato Institute.
<https://www.cato.org/blog/taiwan-arms-backlog-november-2024-update-himars-delivery-second-trump-administration>.
- Gomez, Eric, and Joseph O'Connor. 2025. "Taiwan Arms Sale Backlog, January 2025 Update - Taiwan Security Monitor." Taiwan Security Monitor.
<https://tsm.schar.gmu.edu/taiwan-arms-sale-backlog-january-2025-update-f-16-delays-and-new-contracts/>.
- Grossman, Derek. 2025. "The Chinese Communist Party's Gray Zone Tactics Against Taiwan." *Counter Ideological Work and Political Warfare*, (March), 1-15.
https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP70899.html.
- Grzegorzewski, Filip. 2022. "Strategic Ambiguity in US-Taiwan Relations During the Donald Trump Administration." *Polish Political science Yearbook* 50, no. 1 (January): 59-74. 10.15804/ppsy202210.
- Hanif, Sobia, Bushra Haider, and Samrana Afzal. 2025. "Taiwan's Strategic Role in US-China Geopolitical and Technological Rivalry." *Global Foreign Policies Review* 8, no. 1 (March): 69-76. 10.31703/gfpr.2025(VIII-I).07.
- Ikenberry, Gilford J. 2014. "From Hegemony to the Balance of Power: The Rise of China and American Grand Strategy in East Asia." *International*

Journal of Korean Unification Studies 23 (3): 41-63.

10.33728/ijkus.2014.23.2.002.

Imran, Sumeera, and Humayun Javed. 2024. "Analyzing Biden's Approach to Taiwan: Patterns of Continuity and Change." *Journal of Globalization Studies* 15, no. 1 (May): 95-109. 10.30884/jogs/2024.01.06.

Johnson, Jesse. 2024. "Biden says he won't rule out use of U.S. military to defend Taiwan." *The Japan Times*, June 5, 2024.

<https://www.japantimes.co.jp/news/2024/06/05/asia-pacific/politics/biden-defend-taiwan-china/>.

Kaidanow, Tina S. 2017. "Foreign Military Sales: Process and Policy." U.S. Department of State.

<https://2017-2021.state.gov/foreign-military-sales-process-and-policy/>.

Khaliq, Riyaz u. 2024. "China sanctions 9 US firms over arms sale to Taiwan." *Anadolu Ajansı*, September 18, 2024.

<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-sanctions-9-us-firms-over-arms-sale-to-taiwan/3333309>.

Khan, Aamir H. 2024. "Taiwan Dilemma: A Flashpoint for the Global Peace." *Margalla Papers* 28 (1): 123-140. 10.54690/margallapapers.28.1.244.

Khan, Muhammad F., Anwar Ali, and Hafiz Hammaduddin. 2021. "The Rise of China: A Threat to US Hegemony." *Pakistan Journal of International Affairs* 4, no. 4 (December): 640-656.

https://www.researchgate.net/publication/358505017_The_Rise_of_China_A_Threat_to_US_Hegemony.

- Kuehn, David. 2021. "Managing the Status Quo: Continuity and Change in the United States' Taiwan Policy." *GIGA Focus Asia*, no. 6 (December): 1-11. <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/managing-status-quo-continuity-change-united-states-taiwan-policy>.
- Lai, Christina. 2024. "US-Taiwan Relations and the Future of the Liberal Order." *Parameters* 54, no. 1 (March): 51-69. 10.55540/0031-1723.3272.
- Larasati, Ria A., and Larasati Larasati. 2025. "The Shift in U.S. Strategic Ambiguity toward Taiwan: A Foreign Policy Change Approach from Trump to Biden." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (December): 161-179. 10.36451/jisip.v22i2.448.
- Lee, Wei-Chin. 2010. "US Arms Transfer Policy to Taiwan: From Carter to Clinton." *Journal of Contemporary China* 9, no. 23 (August): 53-75. 10.1080/106705600112056.
- Lee, Yimou, David Lague, and Ben Blanchard. 2020. "China launches 'gray-zone' warfare to subdue Taiwan." *Reuters*, December 10, 2020. <https://www.reuters.com/investigates/special-report/hongkong-taiwan-military/>.
- Lestari, Indah D., and Yusran Yusran. 2023. "Keterlibatan Amerika Serikat Membantu Taiwan dalam Konflik Wilayah Dengan Tiongkok (2017–2022)." *Balcony: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 7, no. 2 (December): 111–123. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/441>.

- Liang, Xiao, Nan Tian, Diego L. da Silva, Lorenzo Scarazzato, Zubaida A. Karim, and Jade G. Ricard. 2025. "Trends in World Military Expenditure, 2024." *SIPRI Fact Sheet*, (April), 1-12. 10.55163/AVEC8366.
- Liptak, Kevin. 2022. "Biden's past promises for US to defend Taiwan under microscope in meeting with China's Xi." *CNN*, November 14, 2022. <https://edition.cnn.com/2022/11/13/politics/joe-biden-taiwan/index.html>.
- Liptak, Kevin, Donald Judd, and Nectar Gan. 2022. "'Biden says US would respond 'militarily' if China attacked Taiwan, but White House insists there's no policy change.'" *CNN*, May 23, 2022. <https://edition.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-taiwan-china-japan-intl-hnk>.
- Liu, Mingyue. 2023. "From "Strategic Ambiguity" Toward "Strategic Clarity": U.S. Taiwan Policy under Biden Presidency." *Academic Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 1 (June): 1-3. 10.54097/ajmss.v3i1.9050.
- Mazarr, Michael J. 2018. "Understanding Deterrence." RAND. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE295.html>.
- Mubah, Ahmad S. 2014. "Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat." *Jurnal Global dan Strategis* 8, no. 2 (July): 321-337. https://www.researchgate.net/publication/321162134_Kajian_Historis_atas_Kompleksitas_Isu_Taiwan_dalam_Hubungan_China_dan_Amerika_Serikat.

- Muhammad-Lawal, Adam A., Nik M. Abdullah, Faisal Efendi, and Fadli Januaris. 2025. "Analysis of US Geopolitical Impact on Taiwan's Semiconductor Market through Sharia Principles." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (June): 98-116. 10.30983/al-hurriyah.v10i1.9253.
- Nicastro, Luke A. 2023. "U.S. Defense Infrastructure in the Indo-Pacific: Background and Issues for Congress." *Congressional Research Service Report*, no. R47589 (June), 1-51.
<https://www.congress.gov/crs-product/R47589>.
- Pratiwi, Fadhila I., Dini P. Saraswati, and Muhammad Muttaqien. 2018. "Does the rise of China present a threat to the interests of the United States?" *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 4 (December): 350-357. 10.20473/mkp.V31I42018.350-357.
- Putri, Adinda A., Aprilia S. Lestari, Nadia P. Wijaya, and Rafli A. Hakim. 2024. "Implikasi Kebijakan Penjualan Microchip Taiwan Dalam Pasar Ekonomi Global: Analisis Poliheuristik." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 2 (July): 74-81. 10.32734/politeia.v16i2.14493.
- Rizky, Muhammad E., and Muhammad R. Salim. 2025. "TAIWAN'S OVERALL DEFENCE CONCEPT MILITARY POSTURE: A SECURITIZATION THEORY ANALYSIS." *Indonesian Journal of International Relations* 9, no. 2 (August): 433-451. 10.32787/ijir.v9i2.678.
- Sacks, David. 2023. "Why Is Taiwan Important to the United States?" *Council on Foreign Relations*, June 20, 2023.
<https://www.cfr.org/articles/why-taiwan-important-united-states>.

- Sacks, David, Susan M. Gordon, and Michael G. Mullen. 2023. *U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China*. New York, New York: Council on Foreign Relations.
- <https://www.cfr.org/task-force-reports/us-taiwan-relations-in-a-new-era>.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6 (1): 41-53.
- 10.15548/nsc.v6i1.1555.
- Shushen, Wang. 2022. "Adjustments in U.S. Arms Sales Policy toward Taiwan: Characteristics, Trends, and Implications." *Asia-Pacific Security and Maritime Affairs*, (January), 1-19.
- <https://interpret.csis.org/translations/adjustments-in-u-s-arms-sales-policy-toward-taiwan-characteristics-trends-and-implications/>.
- Spiegel, Steven L. 1995. *World Politics in a New Era*. 1st ed. Orlando, Orange: Harcourt Brace College Publishers.
- Stevenson, Alexandra. 2022. "China Threatens Reaction After U.S. Announces Arms Sales to Taiwan." *New York Times*, September 4, 2022.
- <https://www.nytimes.com/2022/09/04/world/asia/taiwan-china-arms.html>.
- STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. n.d.
- "Arms Transfers Database." SIPRI - Arms Transfers Database.
- <https://armstransfers.sipri.org/ArmsTransfer/TransferData/transferResults?logic=on>.
- Sudarno, Prayudy Y. 2025. "DINAMIKA RIVALITAS CHINA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGAPI KEAMANAN SELAT TAIWAN."

Diplomacy And Global Security Journal : Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional 2, no. 1 (October): 435-447.
10.36859/dgsj.v2i2.4621.

Syabbuddin, Syabbuddin. 2019. "Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan." *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 9, no. 2 (December): 70-81. 10.37630/jpi.v9i2.211.

Tan, Orson, and Alexander C. Tan. 2025. "The 'Clash of Nationalisms' in the Contentious USA–Taiwan–China Relations." *Journal of Asian Security and International Affairs* 12, no. 2 (May): 181-196.
10.1177/23477970251340743.

US-Taiwan Defense and National Security. n.d. "Taiwan Arms Sales Notified to Congress 1990-2025." US-Taiwan Defense and National Security.
<https://www.ustaiwandefense.com/taiwan-arms-sales-notified-to-congress-1990-2025/>.

Wees, Gerrit v. 2021. "Did Biden's Taiwan Remarks Represent a US Policy Change?" *The Diplomat*.
<https://thediplomat.com/2021/08/did-bidens-taiwan-remarks-represent-a-u-s-policy-change/>.

Wickham, Rita J. 2019. "Secondary Analysis Research." *Journal of the Advanced Practitioner in Oncology* 10, no. 4 (March): 395-400.
10.6004/jadpro.2019.10.4.7.

Wingfield, Rupert. 2022. "Taiwan braces as China drills follow Pelosi visit." *BBC*, August 3, 2022. <https://www.bbc.com/news/world-asia-62416363>.

- Wong, Edward, and Amy Qin. 2022. "U.S. Presses Taiwan to Buy Weapons More Suited to Win Against China." *The New York Times*, May 7, 2022.
<https://www.nytimes.com/2022/05/07/us/politics/china-taiwan-weapons.html>.
- Wong, Enoch. 2025. "Explainer | What is the US' island chain strategy and what does it mean for China?" *SCMP*, June 16, 2025.
<https://www.scmp.com/news/china/military/article/3314589/can-island-chain-strategy-contain-chinas-blue-water-naval-ambitions>.
- Xi, Chen, and Ge Tengfei. 2022. "An Analysis of the United States' Deterrence by Denial Strategy Against China." *Journal of International Security Studies*, (September), 1-24.
<https://interpret.csis.org/translations/an-analysis-of-the-united-states-deterrence-by-denial-strategy-against-china/>.
- Xiao, Shiqing. 2024. "Historical Echoes in Contemporary Diplomacy: Analyzing Xi Jinping Administration's Policy Toward Taiwan Within the Framework of China's Century of Humiliation." *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 39, no. 1 (March): 131-137.
10.54254/2753-7048/39/20240695.
- Xiying, Zuo. 2019. "Unbalanced deterrence: coercive threat, reassurance and the US-China rivalry in Taiwan strait." *The Pacific Review* 34, no. 4 (December): 547-576. 10.1080/09512748.2019.1697353.
- Zeyuan, Yu. 2024. "China's dilemma on the US's arms sales to Taiwan." *ThinkChina.sg*, October 28, 2024.
<https://www.thinkchina.sg/politics/chinas-dilemma-uss-arms-sales-taiwan>.

Zulkifli,, Noraini, Kamarulzaman Ramlee,, Mohd N. Samiran,, Amer F. Yasid,,
and Azrul A. Rahman. 2024. "China Aggressiveness in Indo Pacific
Region:Impact towards the U.S's Hegemony." *American Research Journal
of Humanities & Social Science (ARJHSS)* 6, no. 2 (November): 58-70.
<https://www.arjhss.com/wp-content/uploads/2023/02/E625870.pdf>.

Zuo, Yana. 2018. "The U.S. Global Strategy and Its Taiwan Policy." *China
Review* 18, no. 3 (August): 149-176.
<https://muse.jhu.edu/pub/250/article/702458/>.